TABLOID Sinar Tani

TERBIT SETIAP HARI RABU
Harga Tabloid Cetak : Rp 16.000
E-paper : Rp 72.000/Tahun (48 edisi)
www.tabloidsinartani.com

Hotline/SMS : 081317575066
e-mail : redaksi@sinartani.co.id
www.sinartani.co.id

Edisi 10 - 16 Desember 2025
No. 4114
Tahun LVI



8 Awal Tahun, Terbit Tata Kelola Pupuk Subsidi yang Baru

10 Bantuan Alsintan Gratis Ada yang Nakal, Laporkan !

12 Hervia Latuconsina, Penjaga Kekayaan Hoya



www.tabloidsinartani.com tabloidsinartani.com @SinarTaniST tabloidsinartani SINTA TV



EDITORIAL

Catatan dari **Rakernas HKTI**

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) I yang berlangsung di Ciawi, Bogor, Rabu (3/12) berlangsung di tengah bangsa Indonesia berduka dengan adanya bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Ada tiga provinsi yang terkena dampak musibah cukup besar yakni, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Ada banyak catatan Rakernas yang dibuka langsung oleh Ketua Umum DPN HKTI, Sudaryono dan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), serta Ketua Dewan Pertimbangan DPN HKTI, Oesman Sapta Odang (Oso). Pada kesempatan itu, hadir juga Menteri Perdagangan, Budi Santoso.

Catatan pertama datang dari Sudaryono yang juga Wakil Menteri Pertanian. HKTI kini telah bersatu dan mempersatukan. Untuk itu, sebagai organisasi terbesar HKTI ke depan harus menjadi pendamping pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

Apalagi kini era telah berubah. Negara-negara di dunia tak lagi mengambil jalan 'perang' untuk bisa survive, tapi bagaimana mengamankan pangan mereka agar bisa mencukupi kebutuhan rakyatnya. Karena itu, Sudaryono mengajak, seluruh pengurus untuk bersegera bekerja dan tidak setengah hati menjadi bagian HKTI.

Catatan kedua dari Titiek Soeharto mengajak pengurus HKTI flash back saat Soeharto memimpn negeri ini. Sebagai anak biologis mantan Presiden Soeharto, ia mengakui, banyak cita-cita ayahnya yang belum tercapai. Karenanya Ia mengajak bersama-sama, pengurus HKTI menjadikan Rakernas ini sebagai momentum membangun konsensus nasional bahwa petani harus maju, makmur, sejahtera dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Catatan lain dari Titiek Soeharto adalah saat dirinya menyinggung bencana alam di Pulau Sumatera. Bencana alam di Sumatera menjadi pengingat bahwa kita harus menjaga ekosistem alam. Dirinya melihat bencana alam yang terjadi di Pulau Sumatera tersebut tidak hanya faktor iklim, tapi juga adanya kerusakan alam.

Karena itu, rancangan perubahan Undang-Undang Kehutanan akan menjadi salah satu yang masuk dalam proglegnas prioritas tahun 2026 dari DPR RI. Bencana di Sumatera menurutnya, membuktikan hutan adalah penyangga kehidupan petani di sekitar dalam kawasan hutan. Dengan demikian, kehutanan dan pangan bukan dua sektor terpisah, keduanya saling menentukan keselamatan ekologis dan ketahanan pangan nasional.

Catatan ketiga datang dari Menteri Perdagangan, Budi Santoso. Dengan programnya UMKM BISA Ekspor, Busan sapaan akrabnya mengajak, pelaku usaha pertanian, khususnya HKTI, bisa menjadi bagian dalam Program UMKM BISA Ekspor.

Dengan adanya pendatangan Nota Kesepahaman antara Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dengan Direktorat Pengembangan Ekspor menjadi lampu hijau bagi pelaku usaha khususnya UMKM untuk 'bermain' di pasar global.

Berkaca kasus yang kerap terjadi, Busan mengingatkan, selama ini banyak UMKM tampil meyakinkan di pengiriman pertama, namun kualitas dan kuantitas mulai turun pada pengiriman kedua, apalagi ketiga. Padahal disisi lain, pembeli (buyer) memperlukan konsistensi produk yang dikirim.

Semua catatan tersebut menjadi PR bagi HKTI. Peran HKTI tak sebatas advokasi, tapi juga berjalan menjadikan Indonesia lebih baik.



SAUNG TANI

Bantu banjir dan longsor di Sumatera, pemerintah kirim pangan lewat hercules dan kapal laut
- Korban sudah menunggu

HKTI gelar Rakernas 1
- Waktunya kerja

Kementan kumpulkan donasi bencana Sumatera senilai Rp 75 miliar
- Luar biasa...

MENTAN MENYAPA



Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian RI

Bencana Sumatera, Kami Kawal Setiap Bantuan

Musibah banir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat menjadi duka bagi seluruh rakyta Indonesia. Karena kami ingin memastikan penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Bantuan ini merupakan langkah cepat pemerintah untuk menjamin kebutuhan pangan warga tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat. Bantuan dikirim melalui darat, udara, dan laut secara berkelanjutan, termasuk menggunakan pesawat dan kapal laut dengan dukungan penuh TNI. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita, dan karena itu setiap proses pengiriman kami kawal secara ketat.

Bantuan ini merupakan wujud kepedulian Kementan Peduli yang berasal dari para mitra strategis, pengusaha, serta pegawai Kementerian Pertanian. Karena itu, kami memastikan bantuan ini sampai ke tujuan dan tidak ada yang disalahgunakan.

Pengiriman bantuan Kementan Peduli tahap pertama telah dimulai sejak Kamis (4/12) melalui jalur udara via Bandara Halim Perdana Kusuma. Bantuan tersebut telah tiba di Aceh dan diterima secara resmi oleh BNPB. Pengiriman tahap berikutnya juga telah dilakukan menggunakan armada laut sebagai bagian dari percepatan distribusi bantuan ke wilayah terdampak.

Alhamdulillah kemarin bantuan melalui Hercules sudah tiba di Aceh dan diterima BNPB. Hari ini kita berangkatkan lagi menggunakan kapal laut atas bantuan Kepala Staf Angkatan Laut. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Kasal beserta jajaran atas dukungannya.

Pada tahap pertama, sebanyak 207 truk logistik diberangkatkan melalui jalur udara dan laut. Bantuan yang dikirim terdiri dari kebutuhan konsumsi dan operasional darurat seperti beras, mi instan, minyak goreng, susu, air mineral, makanan siap saji, selimut, dan genset untuk mendukung fasilitas di wilayah terdampak.

Kami ingin memberitahukan bahwa total bantuan yang telah dikirim melalui skema Kementan Peduli kini mencapai Rp34,8 miliar. Jumlah tersebut dipastikan akan terus bertambah seiring perkembangan kebutuhan di lapangan. Bantuan ini adalah titipan pegawai Kementan dan seluruh stakeholder dan kami bertanggung jawab penuh memastikan semuanya sampai ke tangan yang berhak.

Karena itu, prosesnya kami kawal mulai dari gudang, naik ke Hercules, naik ke kapal, hingga diterima BNPB di daerah. Setiap bantuan didokumentasikan, ada berita acara, dan dikonfirmasi langsung oleh tim di lapangan.

Selain bantuan dari program Kementan Peduli, kami juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengirimkan bantuan pangan reguler berupa 44 ribu ton beras serta 6 ribu ton minyak goreng sebagai dukungan pemenuhan stok pangan daerah terdampak. Cadangan beras pemerintah juga disiapkan hingga tiga kali lipat dari kebutuhan agar tidak terjadi kekurangan suplai di lapangan.

Kami ingin menegaskan kembali bahwa tidak boleh ada saudara kita yang kelaparan. Stok beras aman, bahkan Aceh sendiri punya surplus. Negara hadir, dan kita pastikan distribusi berjalan.

Kami juga ingin mengapresiasi dukungan operasi penyaluran ini tidak hanya melibatkan TNI AL dan TNI AU, tetapi juga jajaran lainnya termasuk TNI AD, Polri, BNPB, Bulog, dan pemerintah daerah setempat. Apresiasi juga kepada seluruh elemen yang terlibat dalam percepatan penanganan. Sekali lagi, kami pastikan bantuan ini hadir secepat mungkin.

PINDAI BARCODE!
Untuk Mengakses e-paper Sinartani.



Desain Cover: Budi Putra K.
Foto Cover: Dok. Sinartani (HEP)

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Dr. Ir. Memed Gunawan; **Pemimpin Perusahaan :** Ir. Mulyono Machmur, MS; **Pemimpin Redaksi :** Yulianto; **Redaktur Pelaksana :** Yulianto; **Redaktur :** Gesha Yuliani, S.Pi; **Staff Redaksi :** Julian Ahmad; Nattasya; Indri Hapsari, S. Sos; Echa; Herman Rafi; **Koresponden :** Wasis (Cilacap), Soleman (Jatim), Suriady (Sulsel), Abdul Azis (Aceh), Suroyo (Banten), Gultom (Sumut), Nsd (Papua Barat); **Layoutman :** Suhendra, Budi Putra Kharisma; **Korektor/Setter**: Asrori, Hamdani; **Sekretariat Redaksi:** Hamdani; **Pengembangan Bisnis :** Dewi Ratnawati; Indri; Echa Sinaga; **Keuangan:** Katijo, SE (Manajer); Ahmad Asrori; **Sekretariat Perusahaan** : Suparjan; Jamhari; Awan; **Distribusi:** Saptyan Edi Kurniawan, S.AP; Dani; Jamhari
Penerbit: PT. Duta Karya Swasta; Komisaris Utama: DR. Ir. A. H. Rahadian, M.Si; **Komisaris:** Ir. Achmad Saubari Prasodjo
Direktur Utama: DR. Ir. Memed Gunawan; **Direktur:** Ir. Mulyono Machmur, MS
Alamat Redaksi dan Pemasaran/Iklan: Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta 12550, Telp. (021) 7812162-63, 7817544 Fax: (021) 7818205
Email: redaksi@sinartani.co.id; **Izin Terbit** No. 208/SK/Menpen/SIUPP/B.2/1986; Anggota SPS No. 58/1970/11B/2002; **Izin Cetak:** Laksus Pangkopkamtibda Jaya No. Kep. 023/PK/IC/7; **Harga:** Rp. 16.000 per edisi; **Tarif Iklan: FC** Rp. 8000/mmk, **BW** Rp. 7.000/mmk; **Pembayaran:** Bank Mandiri Cab. Ragunan No. No rekening 1270096016587; Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413, BNI'46 Cab. Dukuh Bawah Jakarta No. 14471522, Bank Agro Kantor Pusat No. 01.00457.503.1.9 a/n Surat Kabar Sinar Tani. Bank BRI Cabang Pasar Minggu: a/n PT. Duta Karya Swasta No. 0339.01.000419.30.1; **ISSN:** 0852-8586;
Percetakan: PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika

Fermentasi Pakan, Solusi bagi Peternak Skala Kecil



Di wilayah sentra pertanian, jerami dan daun-daunan bisa menjadi bahan baku pakan bernutrisi tinggi. Melalui proses fermentasi sederhana dengan mesin dan teknik praktis akan membantu peternak mencukupi kebutuhan pakan. Bukan hanya lebih hemat, ternak juga jauh lebih sehat.

Pakan selama ini menjadi beban terbesar dalam usaha peternakan, menyumbang sekitar 60–70% dari total biaya. Di sisi lain, kualitas pakan menentukan kesehatan dan produktivitas ternak. Karena itu, pemenuhan kebutuhan gizi hewan ternak harus mendapat perhatian besar oleh peternak melalui pemberian bahan pakan.

Namun persoalannya, pakan ternak yang murah dan bergizi tidaklah mudah didapatkan peternak. Untuk mendapatkan pakan yang murah dan bergizi diperlukan suatu pengetahuan yang memadai dan kiat dalam memanfaatkan bahan pakan yang tersedia di lingkungan peternak.

Salah satu produk limbah pertanian yang berpotensi besar menjadi bahan baku pakan adalah jerami. Keunggulan jerami sebagai bahan baku pakan adalah tidak mengalami pembusukan, sehingga dapat dilakukan proses fermentasi.

Fermentasi merupakan proses pengubahan suatu zat dengan bantuan mikroorganisme dengan menghasilkan karbohidrat. Fermentasi divariasikan dengan waktu 7, 15 dan 21 hari menggunakan probiotik EM4 dan starbio.

Fermentasi pakan muncul sebagai solusi efektif, karena proses ini membantu memecah serat kasar menjadi lebih mudah dicerna oleh hewan, sekaligus meningkatkan kandungan protein, asam amino, dan vitamin B. Dampaknya terlihat nyata, mulai dari ternak lebih sehat, pertumbuhan bobot lebih cepat, dan biaya pakan pun bisa ditekan secara signifikan.

Di Gunungkidul, inisiatif ini diterapkan peternak lokal yang dibimbing penyuluh. Mereka menggunakan drum fermentasi berkapasitas 150 liter, mengisi bahan berupa jerami, daun singkong, dedak, tetes tebu, dan starter mikroba.

Setelah 21 hari fermentasi anaerobik, pakan siap diberikan kepada kambing dan sapi. Hasilnya, konsumsi pakan menjadi lebih efisien, ternak tetap sehat, bahkan ketika musim kemarau mengurangi ketersediaan hijauan segar.

Selain itu, kelompok peternak kambing juga berhasil mengembangkan *complete feed* fermentasi berbasis hijauan. Pendampingan penyuluh terbukti menjadi faktor kunci keberhasilan, terutama dalam menakar bahan tambahan dengan tepat dan menjaga higienitas pakan.

Inovasi sederhana ini menunjukkan bahwa dengan bimbingan yang tepat, peternak skala kecil mampu meningkatkan produktivitas ternak sekaligus menekan biaya operasional.

Alat Fermentasi

Untuk skala kecil, alat fermentasi tak perlu rumit. Drum plastik atau tong 200 liter bisa digunakan untuk menampung hijauan atau limbah pertanian agar fermentasi anaerobik berjalan baik.

Silo kecil dengan tutup rapat cocok untuk komunitas peternak karena mempermudah penyimpanan pakan fermentasi. Selain itu, mesin pengaduk sederhana sangat membantu dalam mencampur bahan pakan dengan dedak, tetes tebu, dan starter mikroba supaya fermentasi merata.

Langkah praktis fermentasi pakan dimulai dengan menyiapkan bahan hijauan seperti jerami, daun singkong, daun jagung, atau limbah sayuran yang dipotong berukuran 2–5 cm agar mudah difermentasi. Selanjutnya, tambahkan bahan tambahan seperti dedak padi atau konsentrat sekitar 10–20% dari total berat hijauan, serta tetes tebu atau gula 2–5% untuk memicu fermentasi.

Campurkan starter mikroba sebanyak 1–2% dari berat bahan, bisa berupa ragi komersial, EM4, atau mikroba lokal hasil pelatihan penyuluh. Lalu masukkan campuran ke dalam drum, tong, atau silo, padatkan sedikit agar udara tidak terlalu banyak tetapi jangan terlalu keras, lalu tutup rapat.

Fermentasi anaerob biasanya berlangsung 14–21 hari, simpan di tempat teduh dan hindari sinar matahari langsung. Periksa kondisi pakan; aroma asam khas tanpa bau busuk dan tekstur lembek tapi tidak berlendir menandakan fermentasi berhasil.

Tips Penting

Agar fermentasi pakan berhasil, pastikan bahan hijauan segar dan bersih, bebas dari tanah atau kotoran hewan. Kelembaban juga penting, karena pakan yang terlalu kering membuat fermentasi tidak sempurna, sedangkan yang terlalu basah mudah berjamur, idealnya sekitar 60–65% kelembaban.

Kontrol udara dengan rapat, tetapi jika menggunakan drum besar, aduk ringan setiap 3–5 hari untuk memastikan fermentasi merata. Perhatikan pula bau dan warna; pakan yang berbau busuk atau muncul jamur menandakan fermentasi gagal dan sebaiknya tidak diberikan ke ternak. **Gesha (dari berbagai sumber)**



SATU HKTI, SATU TEKAD SWASEMBADA



Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di bawah kepemimpinan Sudaryono kini telah bersatu dan mempersatukan. Sebagai lembaga advokasi, HKTI ke depan akan menjadi pendamping pemerintah dalam semua bidang pertanian, khususnya menjaga keberlanjutan swasembada pangan.

Di tengah ancaman krisis pangan yang melanda dunia, kemampuan suatu bangsa dalam mencukupi kebutuhan pangan menjadi kunci survival suatu bangsa. Ketua DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sekaligus Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan, arah pembangunan pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan bergerak pada target besar yaitu swasembada, kedaulatan pangan, dan ketahanan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Temu Tani Nasional dan Rakernas HKTI 2025 yang digelar di Kampus BPPMKP Ciawi, Bogor, Rabu (3/12). Di hadapan para pimpinan asosiasi bidang pertanian, akademisi, peneliti, mahasiswa, hingga pelaku usaha tani dari seluruh Indonesia, Sudaryono membuka sesi utama dengan nada tegas, bahwa pertanian kini berada di titik balik sejarah.

"Sekaranglah eranya pertanian dan pangan menjadi prioritas nasional. Kalau tidak ikut ambil peran di fase ini, sudah pasti keliru," ujarnya. Dalam paparannya yang bernuansa fundamental, Sudaryono mengajak peserta melihat kembali tujuan bernegara. Ia mengutip gagasan John Mersheimer tentang *survival of the state*, bahwa setiap negara pada akhirnya bertindak untuk bertahan hidup.

Menurutnya, konflik di berbagai belahan dunia dari Rusia–Ukraina hingga Israel–Palestina, bermuara pada kepentingan survival masing-masing negara. Karena itu, Indonesia pun harus memperkuat aspek yang paling menentukan keberlangsungan bangsa yaitu pangan.

"Jadi agar bangsa ini survive, Indonesia harus swasembada dan punya kedaulatan pangan. Kalau kita bernegosiasi sementara perut rakyat bergantung pada negara lain, kita pasti kalah," tegas Sudaryono.

Saat ini menurutnya, Presiden Prabowo memilih jalur yang memprioritaskan pangan dan pertanian sebagai fondasi utama pembangunan. Dengan prioritas baru ini, HKTI didorong menjadi kekuatan strategis yang berperan aktif mengawal kebijakan, program, hingga implementasi di lapangan.

Untuk itu, Sudaryono menegaskan HKTI tidak boleh hanya menjadi penonton. HKTI akan menjadi delegasi nasional di garis depan penyusunan program strategis, memastikan para petani terlibat aktif dalam setiap kebijakan besar, mulai dari swasembada beras, jagung, gula, hingga peningkatan produksi hortikultura dan perkebunan.

Karena itu, swasembada bukan sekadar program, tetapi kebutuhan dasar bangsa. "Kedaulatan pangan adalah syarat kita untuk bertahan. Kalau perut kita bergantung pada negara lain, kita tidak pernah benar-benar merdeka," tegasnya.

Dengan komitmen itu, HKTI 2025 resmi bergerak sebagai delegasi nasional dalam mendukung agenda besar pemerintah yakni, transformasi sektor pertanian menuju swasembada dan ketahanan pangan jangka panjang. Bahkan semua komoditas pertanian diproyeksikan menjadi primadona pada 2026.

HKTI langsung tancap gas, mengawal kebangkitan pertanian nasional lewat konsolidasi organisasi dan dorongan kerja nyata di lapangan. Sudaryono memastikan organisasi petani terbesar di Indonesia ini siap gaspol mengawal percepatan pembangunan pertanian nasional.

Sudaryono pun menegaskan bahwa era kerja nyata sudah dimulai. Tidak ada lagi ruang untuk mereka yang setengah hati. "Yang mau kerja ayo, yang nggak mau kerja, silakan minggir," tegasnya, disambut riuh peserta.

Tahun Penting Pertanian

Sudaryono menyebut 2026 akan menjadi tahun penting ketika semua sektor pertanian bergerak serempak. Karena itu, arah kebijakan nasional kini benar-benar fokus pada penguatan pangan. "Petani sering bertanya, kapan tebu? kapan mangga? kapan belimbing? kapan bawang? Sekaranglah momennya. Ini era ketika semua komoditas diperhatikan," ujarnya.

Selain memperkuat perberasan, pemerintah juga menargetkan pengembangan besar-besaran pada sektor peternakan ayam dan telur di 2026. Hilirisasi perkebunan dan hortikultura akan dipacu agar ekspor tak lagi bertumpu pada bahan mentah, tetapi produk olahan bernilai tambah tinggi.

Sudaryono menggarisbawahi bahwa kerja sama antara Kementan dan Kementerian Perdagangan akan membuka pintu ekspor lebih lebar bagi petani. Dengan jaringan HKTI di daerah dan perwakilan perdagangan di luar negeri, ia optimistis kontribusi ekspor pertanian akan melonjak signifikan pada 2026.

"HKTI harus ikut menyumbang besar ekspor. Semua sudah ditandatangani, tinggal bagaimana kita melaksanakan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?" ujarnya. Petani menurut Sudaryono adalah pemain utama dalam rantai ekspor. HKTI, sebagai rumah besar petani, wajib memastikan anggotanya mendapatkan pendampingan, akses pasar, hingga penguatan kualitas produk.

Saat ini kereta besar pembangunan pertanian 2026 sudah bergerak cepat. Dari hulu hingga hilir, dari eksekutif hingga organisasi tani, semua diarahkan pada satu tujuan: petani sejahtera dan pangan Indonesia kuat. "Kalau tidak ikut, pasti ketinggalan kereta. Kalau bukan kita, siapa lagi?" ujarnya.

Dengan fokus pemerintah pada ketahanan pangan dan komitmen HKTI mengawal seluruh komoditas agar menjadi primadona. Tahun 2026 diperkirakan menjadi tahun penting yang menentukan masa depan pertanian Indonesia. **Gsh/Yul**

Point Rakernas HKTI

1. Penguatan organisasi sebagai fokus utama. Konstituen terkecil HKTI adalah kelompok tani, sehingga penguatan pada tingkat akar rumput menjadi fondasi penting.
2. Kaderisasi menjadi sesuatu sangat penting untuk memastikan regenerasi kepemimpinan serta kesinambungan perjuangan petani Indonesia.
3. Penguatan lembaga koperasi dan pendataan kegiatan usaha di lingkungan HKTI. Koperasi dan unit usaha harus menjadi motor penggerak ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani.
4. Komitmen HKTI untuk berperan aktif dalam mewujudkan swasembada pangan, yang menjadi agenda strategis nasional.
5. Anggota HKTI akan didorong lebih aktif dalam program MBG, serta terlibat dalam berbagai upaya modernisasi pertanian. HKTI dan para anggotanya harus siap mendukung setiap program yang dijalankan oleh Kementerian Pertanian.

Rakernas HKTI,

Momentum Membangun **Konsensus Nasional**

Rakernas Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) harus menjadi momentum membangun konsensus nasional untuk menjadi petani lebih maju, makmur dan sejahtera. Apalagi Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan swansembada pangan sebagai bagian dari 17 program prioritas nasional dan delapan asta cita seperti dalam Perpres Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN 2025 2029.



"Hidup tidak surut ke belakang." Demikian diungkapkan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto saat memberikan sambutan pada Rakernas HKTI di Bogor, Rabu (3/12). Karena itu, Titiek mengajak semua pihak bekerja keras untuk menyongsong masa depan yang cerah.

Sebagai anak biologis mantan Presiden Soeharto, ia mengakui, banyak cita-cita ayahnya yang belum tercapai. Ia pun mengajak bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita agar seluruh petani, nelayan dan rakyat Indonesia hidup makmur dan sejahtera.

Nah, Temu Tani Nasional dan Rakernas HKTI pertama ini Titiek mengajak semua pihak menjadikan sebagai momentum membangun konsensus nasional bahwa petani harus maju, makmur, sejahtera dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

"Saya yakin peserta Rakernas hampir semuanya merasakan kejayaan pertanian di masa Presiden Soeharto. Tentunya kita ingin mengulang keadaan itu, kita bisa hidup tentram, sejahtera, gampang cari makan, gampang cari kerja," tuturnya.

Dalam 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. BPS melaporkan, produksi beras nasional dan sampai Desember 2025 mencapai 34,77 juta ton atau naik 13,54% setara 4,15 juta ton dari tahun sebelumnya.

Tak hanya itu, cadangan beras pemerintah (CBP) juga menyentuh rekor tertinggi, lebih dari 4,2 juta ton. Titiek menekankan bahwa capaian ini menjadi indikator strategi peningkatan produksi dan stabilisasi pasokan berjalan efektif. "Ini bukan sekadar angka di laporan. Ini bukti bahwa lahan kita produktif, petani kita bekerja, dan pemerintah hadir memastikan sistemnya berjalan," ujarnya.

Pemerintah juga telah menetapkan HET beras dan jagung di tingkat petani. Kebijakan ini penting untuk memastikan harga yang adil bagi petani dan sebagai penopang utama semangat produksi. "Ketika harga di tingkat petani terjaga, mereka berani menanam, berani investasi, dan berani memperluas produksi," jelas Titiek.

Sementara itu di sisi lain, sebanyak 145 regulasi pupuk diperingkas, sehingga menjadi lebih sederhana. Pemerintah juga telah mencetak sejarah dengan penurunan HET pupuk bersubsidi sebesar 20?gi petani. "Ini bukan sekedar angka, tetapi napas baru yang membuat biaya produksi lebih terjangkau," katanya.

Swasembada Bukan Slogan

Karena itu Titiek Soeharto menilai, swasembada pangan bukan hanya slogan atau prestasi politik di atas kertas. Swasembada pangan harus identik dengan peningkatan kesejahteraan petani. "Ini sudah mulai terlihat nilai tukar petani atau NTP naik dari 120,3 bulan September 2024 menjadi 124,05 di November tahun 2025," katanya.

Titiek menyebut kenaikan ini sebagai "sinyal posisi" yang menunjukkan daya beli dan kesejahteraan petani ikut terdongkrak. "Ini bukti bahwa kebijakan yang pro-produksi dan pro-petani mulai membuahkan hasil," ujarnya.

Titiek menegaskan, swasembada pangan tidak cukup dicapai dalam bentuk angka produksi atau klaim politik. Swasembada harus melekat dengan kesejahteraan petani. "Produksi tinggi itu penting, tapi lebih penting petani mendapatkan manfaatnya. Swasembada harus identik dengan naiknya kesejahteraan petani, bukan sekadar prestasi di atas kertas," tegasnya.

Meski capaian positif terlihat, Titiek menilai pekerjaan rumah sektor pangan masih banyak. Pemerintah dan DPR harus terus memastikan program prioritas berjalan konsisten, termasuk memperkuat hilirisasi, mengurangi ketergantungan impor, dan mengawal distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran.

"Kita sudah menapaki jalur yang benar, tetapi tanggung jawab kita masih panjang. Satu tahun pemerintahan Prabowo menunjukkan fondasi yang kuat, tinggal bagaimana kita menjaga momentum ini agar semangat produksi petani tidak pernah padam," katanya.

Ia mengajak seluruh stakeholder pertanian, petani, penyuluh, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha untuk bergerak bersama menjaga pertumbuhan sektor pertanian agar tetap stabil. "Kalau petani kuat, Indonesia kuat," tutup Titiek Soeharto.

Bahas UU Pangan dan Kehutanan

Pada kesempatan itu, Titiek Soeharto, anggota dewan saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan dan RUU Kehutanan dan menjadi fokus utama dalam Prolegnas 2026. Langkah ini dilakukan untuk melindungi petani, menjaga eko-sistem hutan, sekaligus menghadapi tantangan pangan dan perubahan iklim.

"UU Pangan sudah lebih dari satu dekade. Selama itu banyak perubahan besar terjadi, mulai dari fluktuasi harga global hingga perkembangan teknologi pertanian berbasis digital dan AI. Revisi UU Pangan bukan sekadar menambal ketentuan lama, tapi harus menjawab tantangan masa depan," ujar Titiek Soeharto.

Titiek menekankan, RUU Pangan harus memperkuat kelembagaan pangan nasional, menjamin ketersediaan dan stabilitas harga, serta melindungi petani dari gejolak pasar global. "RUU ini juga mendorong inovasi pertanian dan pemanfaatan teknologi modern agar produktivitas meningkat dan ketahanan pangan nasional semakin kuat," tambahnya.

Selain itu, Titiek menyebut RUU Kehutanan juga menjadi prioritas Prolegnas 2026. Banyak petani dan masyarakat adat hidup berdampingan dengan kawasan hutan, sehingga regulasi kehutanan harus mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian ekosistem dan keberlanjutan produksi pangan.

"Bencana alam di Sumatera yang memutihkan hutan adalah pengingat bahwa kita harus menjaga ekosistem. Kehutanan dan pangan bukan dua sektor terpisah, keduanya saling menentukan keselamatan ekologis dan ketahanan pangan nasional. Saya sendiri menjadi anggota Panitia Khusus Penyelesaian Konflik Agraria untuk memastikan hak petani dan masyarakat adat terlindungi," tuturnya.

Titiek juga menekankan perlunya kebijakan terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR. Sinergi ini penting untuk menekan konflik lahan, mendorong teknologi pertanian ramah lingkungan, dan memaksimalkan potensi pangan lokal untuk pasar domestik maupun ekspor. Titiek optimisme kolaborasi antara legislatif dan eksekutif akan menghadirkan regulasi yang adaptif, responsif terhadap perubahan zaman, dan berpihak pada rakyat serta alam. **Gsh/Yul**

OSO: Hari Kebangkitan Pertanian

Rakernas HKTI yang berlangsung di Bogor, Rabu (3/12), bagi Ketua Dewan Pertimbangan DPN HKTI, Oesman Sapta Odang menjadi Hari Kebangkitan Pertanian. Indonesia yang mempunyai lahan pertanian sangat luas, tak layak menjadi pengimpor beras.



"Rakernas HKTI yang kini telah bergabung dan kokoh dalam satu kesatuan. Hari ini adalah Hari Kebangkitan Pertanian," tegasnya usai Temu Petani dan Rakernas HKTI di Balai Besar PPMKP, Kementerian Pertanian.

Oso, sapaan akrabnya mengungkapkan, Indonesia mempunyai tanah yang sangat luas dan mempunyai pemimpin yang berani menghentikan impor pangan. Tujuannya tak lagi supaya kehidupan petani menjadi lebih baik. "Karena itu, wajar dan pantes anak seorang petani (Sudaryono, red) menjadi pemimpin HKTI," ungkapnya.

Bahkan Oso mengakui, dirinya tidak pantes menjadi pemimpin HKTI. Namun, paling tidak dirinya bisa berkontribusi membantu dalam pemikiran "Kita tidak ingin ekspor produk pertanian dalam finish produk, bukan dalam produk mentah," tegasnya,

Selama ini dirinya melihat kehidupan petani menyulitkan, dari masalah pupuk, bibit dan lain sebagainya. Namun kini Presiden Prabowo Subianto sudah berhasil menangani dengan baik. Bagi Oso, Presiden Prabowo bukan petani, tapi seorang petarung yang berani mengambil keputusan untuk membereskan masalah pertanian di Indonesia. "Tentu ada yang memberikan saran kepada Presiden, sehingga terbuka matanya bahwa 70 persen petani menderita dan harus diselamatkan," katanya. **Yul**

Wamen UMKM: Holding UMKM untuk Petani

Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia, Helvi Yuni Moraza, menegaskan, UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian nasional. Saat ini terdapat sekitar 57 hingga 63 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut, 93 persen merupakan usaha mikro, sementara 60 persen pelakunya adalah perempuan. Helvi menyebut kondisi ini sebagai potensi besar yang harus terus diberdayakan. "UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Mayoritas adalah usaha mikro dengan karakter unik, dan sebagian besar digerakkan oleh perempuan. Ini kekuatan yang luar biasa," ujarnya.

Sebagai Wakil Ketua Umum UMKM di HKTI, Helvi tengah mendorong delapan program strategis pemberdayaan UMKM. Pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan terbentuknya Holding UMKM HKTI. Konsep ini disusun sebagai jalur naik kelas bagi pelaku usaha.

"Kita mulai dari usaha mikro, lalu kita sambungkan dengan *offtaker* agar mereka naik menjadi pengusaha kecil, dan pada akhirnya menjadi pengusaha menengah. Ini roadmap yang sedang kami bangun," katanya.

Helvi juga menyoroti dua persoalan klasik UMKM yang hingga kini masih menjadi tantangan utama, yaitu pembiayaan dan akses pasar. Menurutnya, kedua persoalan tersebut hanya bisa diselesaikan jika ada pendampingan intensif yang dilakukan secara berkesinambungan. "Setelah pendampingan, barulah pembiayaan dan akses pasar bisa kita dorong. Namun yang paling penting adalah konsistensi produk, karena ini sering menjadi kelemahan UMKM," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Helvi turut mengajak seluruh jajaran HKTI untuk terlibat aktif dalam mendorong penguatan usaha rakyat, khususnya di sektor pertanian. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah menyediakan banyak fasilitas untuk mendukung UMKM dan petani.

"Pemerintah sudah memberi banyak fasilitas. Kini tergantung kita, apakah hanya ingin menjadi petani, atau melangkah lebih jauh menjadi



produsen dan menguasai jalur perdagangan yang terkait dengan pertanian," ungkapnya.

Helvi berharap seluruh pengurus DPP HKTI bersama-sama membantu program pemberdayaan tersebut. "Saya minta rekan-rekan DPP ikut mengembangkan jiwa kewirausahaan para petani yang tergabung di HKTI. Kita ingin petani tidak hanya menanam, tetapi juga menjadi pelaku usaha yang kuat," ujarnya. **Herman/Yul**

Wamen Desa dan PDTT: Ayo Kembali ke Desa

Saat ini terdapat sekitar 75 ribu desa di seluruh Indonesia yang terbagi dalam lima kategori yakni, desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Dari jumlah tersebut, sekitar 14 persen atau lebih dari 10 ribu desa masih masuk kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Selain itu, masih ada 10 ribu lebih desa yang belum memiliki aliran listrik, serta sekitar 20 ribu desa yang belum mendapatkan akses internet.

"Ini adalah PR besar kita. Desa-desa tertinggal harus kita dorong menjadi desa berkembang dan maju," kata Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria seraya menambahkan, bahwa pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa.

Setidaknya menurut Riza ada tiga masalah utama yang masih menghambat kemajuan desa, yakni kualitas SDM yang belum optimal, infrastruktur yang belum memadai, dan pembiayaan yang masih terbatas. Karena itu, pembangunan desa tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah.

Ia pun mengajak semua pihak, mulai dari pejabat, akademisi, pengusaha, hingga kaum profesional untuk kembali ke desa dan berkontribusi langsung. "Kami tidak meminta semua orang membangun banyak desa. Cukup satu saja, desa kelahirannya atau desa tempat orang tuanya berasal. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?" ujar Riza.

Riza menilai, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan merupakan tulang punggung desa, sehingga peran organisasi seperti HKTI sangat strategis dalam upaya pemberdayaan desa. Ia pun mengajak kader terbaik HKTI di seluruh Indonesia untuk tampil sebagai pemimpin, mulai dari kepala desa hingga tingkat nasional.

Riza juga menyebut banyak potensi desa yang bisa dikembangkan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari kementerian, perbankan, hingga kalangan pengusaha. Karena itu, ia mengajak dunia usaha untuk ikut terlibat dalam penyediaan modal dan pendampingan agar desa bisa tumbuh lebih cepat. "Tugas kita adalah kembali ke desa, membangun



sektor pertanian dan berbagai potensi lainnya. Cukup satu orang membangun satu desa, desa maju Indonesia maju," katanya. **Herman/Yul**

Lampu Hijau HKTI

Menembus Pasar Global

Kementerian Perdagangan memberikan lampu hijau bagi anggota Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang ingin 'bermain' di pasar global. Pintu itu makin terbuka saat penandatangan Nota Kesepahaman antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian saat Temu Tani dan Rakernas HKTI di Bogor, Rabu (3/12).



Bukan hal baru lagi ketika mendengar UMKM pertanian Indonesia kerap gagal menembus pasar global akibat kualitas yang tak konsisten. Persoalan tersebut yang kemudian mendorong lahirnya penandatangan Memorandum of Undestanding (MoU) atau Nota Kesepahaman antara Kementerian Perdagangann dan Kementerian Pertanian.

MoU antara Kementan dan Kemendag bukan sekadar penandatanganan formal, melainkan langkah strategis untuk memastikan produk pertanian Indonesia yang telah diakui kualitasnya bisa hadir secara konsisten di pasar internasional. MoU ini juga membuka jalan baru bagi UMKM pertanian, khususnya anggota HKTI untuk mengisi ceruk pasar pertanian di dunia.

Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam sesi usai penandatanganan MoU bercerita, selama ini banyak UMKM tampil meyakinkan di pengiriman pertama, namun kualitas dan kuantitas mulai turun pada pengiriman kedua, apalagi ketiga. "Buyer itu butuh konsistensi. Banyak UMKM kita yang semangat di awal, tapi sustain-nya lemah," ujarnya.

Dua Kekuatan Kunci

Kerja sama Kementan–Kemendag juga menghadirkan dua kekuatan kunci yang selama ini berjalan sendiri-sendiri, namun kini disatukan untuk mendorong UMKM pertanian menembus pasar global dengan lebih terarah. Di satu sisi, Kementan memiliki jaringan petani, pelaku UMKM pangan, hingga anggota HKTI yang tersebar di seluruh Indonesia.

Di sisi lain, Kemendag mengoperasikan 47 kantor perwakilan dagang dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di 33 negara yang menjadi garda terdepan promosi produk Indonesia di pasar internasional. Sinergi ini menjadi formula untuk membenahi persoalan klasik yang menghantui UMKM pertanian selama bertahun-tahun yakni, kualitas produk yang naik-turun, standar yang belum terpenuhi, kapasitas produksi yang kecil, hingga pengiriman yang tidak berkelanjutan.

Kementerian Perdagangan memberikan kesempatan bagi anggota HKTI masuk jalur *business matching* resmi yang mereka sediakan. Dengan masuknya HKTI ke jalur *business matching* resmi Kemendag, pemerintah ingin memastikan UMKM tidak hanya mampu mengekspor sekali, tetapi mampu menjaga kontinuitas suplai dan kualitas dari waktu ke waktu.

"Produk pangan Indonesia sebenarnya sangat diminati dunia. Rempah-rempah, sambal, kopi, kudapan tradisional, hingga berbagai komoditas hasil pertanian segar memiliki pasar yang kuat di mancanegara," kata Busan.

Namun tingginya permintaan global tidak akan banyak berarti apabila UMKM tidak mampu memenuhi pasokan secara berkala. Inilah celah yang ingin ditutup melalui kerja sama ini. Bagi ribuan pelaku UMKM pangan di bawah HKTI, peluang ekspor yang selama ini terasa jauh kini makin dekat.

Akses *business matching* yang lebih terarah, pendampingan yang lebih ketat, dan dukungan perwakilan dagang luar negeri menjadikan peluang ekspor bukan lagi sekadar wacana, tetapi kesempatan nyata yang tinggal dimaksimalkan. Nantinya dalam forum tersebut akan ada proses seleksi dan pertemuan langsung dengan buyer internasional yang selama ini menjadi pintu utama ekspor.

Karena itu, Kemendag meminta Kementan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian untuk mengkurasi anggota HKTI yang benar-benar siap ekspor dan menyampaikan daftar kandidat yang layak untuk ikut dalam *business matching*. Selama ini menurut Busan, sapaan akrab Mendag, banyak pelaku usaha UMKM mengikut *bussiness matching*, tapi dari HKTI belum ada.

"Dengan kerja sama ini, kami berharap Kementan dapat mengkurasi produk anggota HKTI yang punya potensi ekspor, lalu disampaikan ke pihaknya. Selanjutnya akan dijadwalkan business matching," tuturnya.

Proses kurasi ini bukan sekadar administrasi, tapi penilaian serius atas kesiapan produksi, standar mutu, kontinuitas bahan baku, hingga ketepatan menentukan negara tujuan ekspor. Tanpa kurasi yang ketat, antrean UMKM ke jalur business matching bisa mengular panjang.

Salah satu poin paling penting dari kerja sama ini adalah pendampingan berkelanjutan. Kemendag menegaskan bahwa semua peserta business matching, termasuk dari HKTI akan dimonitor oleh perwakilan perdagangan Indonesia di 33 negara.

Monitoring ini dilakukan sebelum pameran, selama pertemuan dengan buyer, hingga setelah terjadi transaksi. Artinya, UMKM tidak dilepas begitu saja, tetapi dikawal agar standar kualitas tetap stabil dari pengiriman pertama sampai berikutnya.

BISA Ekspor

Membantu UMKM yang berada dalam naungan HKTI, Kemendag membuka jalan ekspor bagi UMKM lewat program BISA Ekspor. Semua proses bisa online, tanpa kendala bahasa, dan difasilitasi penuh pemerintah agar pelaku usaha cepat tembus pasar global. "Ekspor jangan dimonopoli perusahaan besar saja. UMKM harus ikut menikmati pasar global, dan pemerintah siap memfasilitasi," tegas Busan.

Dari Januari–Oktober, Kemendag telah memfasilitasi 1.134 *business matching*, dengan nilai transaksi mencapai Rp2,4 triliun. Yang membanggakan, 70 persen UMKM peserta adalah pelaku yang sebelumnya belum pernah melakukan ekspor. "Kami ingin ekspor itu inklusif: besar, menengah, kecil, semuanya ikut. Yang belum punya pengalaman justru kami dorong paling depan," kata Busan.

Di hadapan para petani dan pelaku usaha anggota HKTI, Budi menegaskan, produk pertanian Indonesia memiliki peluang besar di pasar global. Apalagi selama pangan masih menjadi kebutuhan dasar dunia, permintaan tidak akan pernah berhenti.

"Kalau pangan kita berlimpah, seperti arahan Presiden, kita juga harus bisa menjadi pemasok dunia. Dan UMKM harus mengambil peran itu," ujarnya. Program BISA Ekspor diproyeksikan terus diperluas pada 2026, membuka jalur lebih luas bagi UMKM untuk memperkenalkan produk unggulan Indonesia ke pasar internasional

Kinerja ekspor Indonesia menunjukkan tren positif. Dari Januari–Oktober 2025, total ekspor naik 6,96 persen Sektor pertanian bahkan melaju lebih kencang, dengan pertumbuhan 26,56 persen pada periode yang sama—torehan tertinggi dibanding sektor lain. Selama 2020–2024, tren pertumbuhan ekspor pertanian tercatat 7,17 persen, menunjukkan konsistensi peningkatan permintaan global. "Ini keberhasilan para petani, pelaku UMKM, dan seluruh rantai pasok. Produk kita jelas dicari dunia," kata Budi. **Gsh/Yul**

Awal Tahun,

Terbit Tata Kelola Pupuk Subsidi yang Baru



Pemerintah terus memperbaiki tata kelola pupuk subsidi. Setelah awal tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres No. 06 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Subsidi, kemudian ditindaklanjuti Permentan No. 15 Tahun 2025 sebagai aturan pelaksanaan. Kini Pemerintah menyiapkan kembali Perpres No. 113 Tahun 2025.

Seperti diketahui dalam penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah mengedepankan prinsip 7T yakni, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, tepat harga, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat penerima. Bahkan untuk mempermudah petani mendapatkan pupuk subsidi, pemerintah membuka kesempatan gabungan kelompok tani (gapoktan) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi titik serah.

Sebagai upaya membenahi tata kelola pupuk subsidi, pemerintah kembali melakukan deregulasi tata kelola pupuk bersubsidi dengan merilis Perpres No 113 Tahun 2025. Kebijakan baru tersebut akan resmi berlaku mulai minggu pertama Januari 2026. Aturan itu akan menyempurnakan ketentuan pupuk bersubsidi yang sudah ada dan regulasi terkait lainnya di subsektor tersebut.

Direktur Pupuk Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Jekvy Hendra mengatakan, Perpres No 113 Tahun 2025 rencananya sudah ditandatangani pada November 2025 ini. Namun karena harus disinkronkan dengan regulasi terkait lainnya maka perpres itu baru akan diberlakukan minggu pertama di Januari 2026.

"Berlaku minggu pertama di 2026, tapi semua tahapannya dalam proses. Jadi, perpres sudah turun, baru kemudian kita lakukan perubahan, deregulasi aturan-aturan yang baru," tutur Jekvy saat Focus Group Discussion (FGD) bertema Menata Data, Menjamin Asa: Mewujudkan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang Adil dan Tepat di Bogor, (24/11).

Kementerian Pertanian memastikan perubahan besar sedang digodok lewat Perpres 113 Tahun 2025 tersebut akan mengubah cara Indonesia menyalurkan pupuk bersubsidi. Dengan regulasi baru tersebut, diharapkan ketersediaan pupuk bagi para petani di Indonesia dijamin dari sisi volume dan waktu.

Ruang Lebih untuk BUMN Pupuk

Di sisi lain, BUMN pupuk yakni Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) punya ruang lebih besar untuk merevitalisasi seluruh pabriknya karena memiliki pendanaan yang memadai. Jadi menurut Jekvy, misi dari aturan baru tersebut adalah memberi kesempatan bagi PIHC untuk dapat memperbaiki atau merevitalisasi seluruh pabriknya.

"Mulai dari mengatur ketersediaan bunga, soal bank. Arti kata, bisa dikurangi sehingga keuntungan yang didapat teman-teman PIHC lebih banyak, tapi petani dan masyarakat dipastikan dan dijamin ketersediaan pupuknya, lebih tersedia dan tepat waktu," ungkapnya.

Jekvy mengungkapkan, salah satu mekanisme yang diperbaiki adalah penataan dari PP No. 45, UU No 01 Tahun 2004, lalu penataan dari PMK (peraturan menteri keuangan). "Kalau sudah klop dan *clear*, baru jalan," ujarnya.

Perpres No 113 Tahun 2025 itu juga akan menyempurnakan Perpres No 06 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Termasuk, kemungkinan memperluas jenis pupuk dan komoditas yang mendapat subsidi, meski keduanya masih tahap penerimaan masukan.

"Kalau di Perpres No 06 Tahun 2025, mungkin kita baru menata tidak adanya distributor. Di perpres baru ada perbaikan menyangkut penataan PIHC serta jaminan terhadap masyarakat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi serta bagaimana peta harga yang relatif turun seperti HET (baru)," tutur Jekvy.

Jekvy mengakui, satu isu yang paling krusial dalam tata kelola pupuk subsidi adalah harga pupuk. Selama ini, pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan pola *cost* plus, yakni HPP (Harga Pokok Produksi) dikurangi Harga Eceran Tertinggi (HET). Nah, pada Perpres No. 113 Tahun 2025 nanti pemerintah menggeser pendekatannya.

Tanggung Jawab PIHC

Nantinya, skema penyaluran distribusi pupuk bersubsidi menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHC. Dengan demikian, pada awal 2026, semuanya berjalan menggunakan konsep baru. "Sistemnya *market to market,* berdasarkan harga pasar dikurangi HET (harga eceran tertinggi, red). Kalau sekarang *cost plus*, HPP (harga pokok produksi, red) dikurangi HET," katanya.

Skema baru ini, bakal membuat pabrikan pupuk lebih leluasa mengatur produksi, sekaligus menurunkan tekanan bunga bank. "Perubahan ini akan memberikan kesempatan untuk revitalisasi pabrik, likuiditas bunga bank bisa ditekan, dan keuntungan BUMN pupuk akan lebih sehat. Yang penting, petani tetap dijamin pupuknya tersedia tepat waktu," ujarnya.

Garis besarnya sederhana, harga pupuk subsidi akan lebih rasional, produksi lebih stabil, dan pasokan buat petani lebih aman. Selain skema harga, jalur distribusi juga memasuki bab baru. Pada aturan sebelumnya, Perpres No. 6 Tahun 2025, peran distributor dirampingkan. Kini, lewat Perpres 113, struktur distribusi kembali ditata agar lebih efisien dan tepat sasaran.

"Di Perpres yang baru akan ada perbaikan penataan terhadap PIHC serta jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan pupuk," kata Jekvy. Salah satu yang paling terasa bagi petani adalah penurunan HET. "Hari ini HET turun sangat besar. Efeknya, pupuk bisa tembus 32 ribu ton per hari. Sebelumnya hanya 18–27 ribu ton per hari," ungkapnya.

Lonjakan penyaluran harian ini menjadi bukti bahwa rantai distribusi bergerak lebih cepat, dan pasar mulai merespons perubahan regulasi. Secara resmi, implementasi Perpres No. 113 Tahun 2025 direncanakan pada minggu pertama 2026. Namun proses menuju titik itu memerlukan penyelarasan lintas-regulasi, lintas-kementerian, dan lintas-sistem.

"Ini semua tahapan. Perpres sudah turun, baru kita lakukan penataan aturan turunannya," tegas Jekvy. Meski begitu, tanda-tanda perubahan sudah muncul. Misalnya, harga mulai terkoreksi, HET turun signifikan, laporan masyarakat cepat ditindak, dan penyaluran harian naik drastis.

Pola kerja di lapangan juga jauh berbeda dibanding sebelumnya. Bahkan hubungan antara PIHC dengan penyuluh kian rekat dan sudah bergerak dalam satu gerbong, memadukan data, distribusi, dan pengawasan secara terintegrasi. Satu harapannya, petani tak lagi kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. **Ditjen PSP**

Mainkan Harga Pupuk Subsidi, Ijin Terancam DICABUT

Sejak pemerintah menetapkan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi 20 persen, serapan pupuk subsidi langsung meningkat tajam. Apalagi kini distribusi pupuk juga lebih sederhana. Namun demikian, masih ada saja pelaku usaha, baik kios dan distributor yang mempermainkan petani.

Bagi petani penurunan HET yang berlaku pada 22 Oktober 2025 menjadi angin segar saat musim tanam Oktober-Maret tiba. Penurunan HET pupuk subsidi tersebut sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Untuk Pupuk Urea dari Rp2.250 menjadi Rp1.800/kg (turun Rp450/kg) atau dari Rp112.500 menjadi Rp90.000/sak (turun Rp22.500/sak). Kemudian, NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840/kg (turun Rp460/kg) atau dari Rp115.000 menjadi Rp92.000/sak (turun Rp23.000/sak).

Sedangkan NPK kakao dari Rp3.300 menjadi Rp2.640/kg atau dari Rp165.000 menjadi Rp132.000/sak. Sementara pupuk ZA dari Rp1.700 menjadi Rp1.360/kg (khusus tebu) atau dari Rp85.000 menjadi Rp 68.000/sak (khusus tebu). Adapun pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640/kg atau dari Rp32.000 menjadi Rp25.600/sak.

Cabut Ijin Oknum Nakal

Ketika petani makin antusias menyerap pupuk subsidi, ada saja oknum kios dan distributor yang mencoba mempermainkan petani. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali menemukan para distributor pupuk nakal, yang berani menjual pupuk subsidi di atas HET. Dalam laporan mingguan pengawasan pupuk yang digelar setiap Jumat, terungkap ada distributor yang masih nekat menjual pupuk subsidi di atas HET.

"Kami tindaklanjuti laporan dari seluruh masyarakat tani Indonesia," kata Amran saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Jumat (21/11). Menurutnya, banyak isu yang masuk, tetapi prioritas utama adalah pelanggaran HET. Dalam satu minggu ini masih ada 115 distributor yang menjual di atas HET. "Hari ini juga kami minta Pupuk Indonesia segera tindak, cabut izinnya," katanya.

Amran menilai bahwa praktik tersebut sangat merugikan petani, terlebih pemerintah sudah menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen. Karena itu, seluruh distributor yang terbukti curang langsung diperintahkan untuk dicabut izinnya hari ini juga. "Tidak ada kompromi bagi yang bermain harga. Laporan ini tentu kami lakukan verifikasi terlebih dahulu dan semua yang diverifikasi, sudah terbukti, langsung dicabut," tegasnya.

Selain temuan kecurangan harga, Amran juga menerima laporan adanya 136 pengecer dan distributor yang masih mempersulit petani saat menebus pupuk dengan mewajibkan kartu tani. Padahal pemerintah sudah menegaskan bahwa penebusan pupuk subsidi cukup menggunakan KTP. "Kami minta ditegur. Kalau minggu depan masih terjadi, izinnya juga kami cabut," tegasnya lagi.

Amran kembali menegaskan tidak ada toleransi bagi pengecer yang bermain curang dengan menahan atau menjual pupuk di atas HET. Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi petani dari praktik curang yang merugikan dan memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan tepat sasaran.

Ada Perbaikan

Lebih lanjut, Mentan Amran menyebut bahwa meski masih ada oknum yang mencoba bermain, kondisi lapangan menunjukkan perbaikan signifikan. Dari lebih dari 2.039 laporan kios dan distributor nakal sebelumnya, kini hanya tersisa sekitar 115 kasus, atau sekitar 5–7 persen dari total awal. "Alhamdulillah, awalnya 2.039 yang nakal, kini tinggal sekitar seratusan. Ini kemajuan besar," katanya.

Ia memastikan pemerintah menjamin ketersediaan pupuk untuk petani, dan setiap pelanggaran yang terbukti akan ditindak cepat. Namun Amran mengingatkan seluruh distributor dan pengecer agar tidak lagi mempersulit petani menjelang musim tanam.

Pengawasan akan terus diperketat dan setiap pelanggaran akan berakhir pada sikap yang sama. "Izin dicabut. Tidak ada ruang bagi pemain curang," kata Amran. Bagi yang menemukan pelanggaran, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman membuka layanan Whatsapp "Lapor Pak Amran" dengan nomor 082311109390.

Dengan adanya nomor WA Lapor Pak Amran, kini ada tiga nomor pengaduan terkait permasalahan pupuk subsidi. Sebelumnya ada dua nomor kontak yakni kontak pengaduan pupuk dengan nomor 0823 1110 9690. Selain itu, hotline kppp pusat kontak pengaduan pupuk di nomor 0812 1533 5574.

Memastikan kondisi di lapangan, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu kios pupuk di Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (22/11). Dalam kunjungan itu, Mas Dar, sapaan akrab Wamentan menjelaskan, sejumlah petani mengaku harga pupuk di kios tersebut sudah turun dan sesuai dengan HET baru.

Sudaryono menegaskan, pemerintah telah resmi menurunkan harga pupuk dan meminta seluruh kios untuk menerapkan harga tersebut tanpa ragu. Ia juga memastikan pemerintah sudah menyiapkan mekanisme kompensasi bagi kios atas selisih harga. "Kami ingin memastikan distribusi pupuk berjalan lancar dan kelompok tani dapat membeli pupuk tanpa hambatan. Kelompok-kelompok tani aman. Yang penting harga sesuai aturan," tuturnya.

Ia juga mengingatkan, petani agar tidak termakan isu menyesatkan yang beredar di ruang publik, termasuk kabar yang menyebut pemerintah memberikan pupuk secara gratis. Berita yang benar, pemerintah telah menurunkan harga pupuk hingga 20 persen sebagai upaya meringankan beban biaya produksi para petani.

"Jadi pupuknya bukan gratis. Yang ada, harga pupuk diturunkan 20 persen, jadi harganya lebih terjangkau. Ini juga salah satu langkah konkret pemerintah untuk meringankan beban petani," katanya.

Menurutnya, saat ini cukup banyak narasi menyesatkan yang sengaja disebarkan pihak-pihak yang tidak memahami kondisi pertanian. Narasi itu kerap memunculkan persepsi keliru dan dapat mengganggu kepercayaan petani terhadap program pemerintah. "Jangan sampai opini-opini yang tidak berdasar membelokkan fakta," tegasnya. **Ditjen PSP**



Bantuan Alsintan Gratis
Ada yang Nakal, Laporkan !

Bantuan alat mesin pertanian menjadi salah satu upaya Kementerian Pertanian meningkatkan produksi pangan. Bantuan yang pemerintah berikan tersebut sifatnya gratis dan tidak ada pungutan biaya apapun. Karena itu, jika ada yang melakukan pungli, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman meminta segera untuk melaporkan.

Praktik nakal yang merugikan petani kembali terungkap. Setelah kasus distributor pupuk nakal yang menjual pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), Mentan Amran mendapat laporan 31 kasus pungutan liar (pungli) dan penyalahgunaan bantuan alsintan. Modusnya alsintan yang seharusnya diberikan secara gratis kepada petani, ternyata ada oknum yang meminta pungutan.

"Dari ribuan bantuan alsintan yang kami salurkan, kami dapat laporan, masih ada 31 kasus yang bermasalah. Di antaranya ada pungutan, ada yang minta fee, bahkan ada yang mewajibkan bayar dulu baru traktor diterima. Padahal semuanya gratis untuk petani," kata Amran kepada media di Jakarta, Jumat (21/11).

Ia mengatakan, bahwa seluruh kasus tersebut langsung dilimpahkan ke penegak hukum di daerah untuk diproses tanpa kompromi. "Kasus yang ini kami langsung kirim ke penegak hukum setempat. Kalau ada pidana, ya dipidanakan. Kami akan cek lagi langsung di lapangan," tambah Mentan.

Amran menjelaskan, modus pungli alsintan bukan hal baru. Bahkan, pola penyimpangannya kerap berulang, terutama pada bantuan yang dikirim dari pemerintah pusat. Oknum tersebut memanfaatkan ketidaktahuan petani dengan meminta fee, menarik biaya administrasi, atau bahkan mewajibkan pembayaran sebelum traktor atau mesin diterima. Padahal seluruh bantuan tersebut telah ditetapkan sepenuhnya gratis.

"Biasanya ada bantuan alsintan dari pusat, tapi dipungut biaya. Ada yang meminta uang administrasi, ada yang minta fee, bahkan ada yang mewajibkan bayar dulu baru alsintannya diberikan. Itu tidak boleh. Itu bantuan gratis untuk petani," lanjut Amran.

Karena itu Ia meminta petani untuk terus melapor jika menemukan pungutan atau penyimpangan dalam distribusi bantuan pertanian. Bahkan Amran telah membuka kanal pengaduan khusus dan terus menindak setiap laporan yang masuk. "Sejak kami jadi menteri, pengaduan sudah kami buka dan sampai sekarang tetap kami jalankan. Kalau ada pungutan, laporkan saja ke nomor yang sudah kami sampaikan," katanya.

Amran mengatakan, kini pengawasan semakin diperketat, terutama sejak pemerintah menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen dan menyalurkan bantuan alsintan bernilai triliunan rupiah ke seluruh daerah. Dengan penindakan tegas ini, pemerintah ingin memastikan setiap rupiah bantuan dan setiap unit alsintan benar-benar sampai ke tangan petani tanpa pungutan, tanpa permainan, dan tanpa celah bagi oknum.

"Kita harus kontrol ketat. Jangan sampai ada yang bermain. Alhamdulillah sekarang ada PPL yang dikendalikan langsung di daerah, sehingga lebih mudah memantau penyimpangan di lapangan. Pengawasan jadi sangat mudah, kami minta jangan ada lagi yang mainkan bantuan ya," kata Amran.

Pungli Alsintan

Dalam berbagai kesempatan, Amran juga selalu kembali menegaskan komitmennya memberantas praktik pungli yang menyasar petani. Melalui kanal Lapor Pak Amran, dirinya kembali menerima laporan tentang pungli alsintan berupa traktor roda empat di 99 titik di berbagai daerah.

"Ini lapor Pak Amran membuahkan hasil. Aku tidak sanggup melihat kalau ada orang yang saya tindak. Itu tidak mudah. Tapi harus kami tindak. Saya sudah sering ungkapkan dan ingatkan jangan macam-macam. Ini uang negara jangan ada yang mempermainkan petani. Petani sudah sulit, jangan menambah berat hidup petani," katanya.

Berdasarkan kanal "Lapor Pak Amran", terungkap modus seorang staf Kementerian Pertanian mengaku sebagai Direktur Jenderal Tanaman Pangan, kemudian meminta uang kepada petani yang ingin memperoleh traktor. Staf tersebut dilaporkan mengutip uang dari masyakarat yang ingin mengakses bantuan traktor, dengan nominal antara Rp 50-100 juta per unit alsintan

"Ada pungutan Rp50 juta sampai Rp100 juta per traktor. Jika satu titik ada banyak alsintan, maka punglinya bisa mencapai Rp600 juta. Ini tidak manusiawi. Bantuan pemerintah itu gratis untuk rakyat," tegas Amran.

Setelah dirinya menerima laporan, Amran bercerita segera memanggil staf yang diduga melakukan pungli. Pada akhirnya oknum tersebut mengaku telah melakukan pelanggaran. Tidak hanya itu, pihak lainnya termasuk pihak eksternal Kementan yang diduga terlibat juga akan terus dikejar.

"Yang pegawai kementerian langsung saya berhentikan hari ini. Dia mengaku Dirjen di lapangan, padahal staf. Saya tanya, dia mengaku, katanya khilaf. Ini pidana. Tidak ada kompromi," ujarnya.

Menurut Amran, seluruh bukti sudah diserahkan kepada penegak hukum, termasuk bukti transaksi. Tindak lanjut hukum akan dilakukan segera untuk memastikan jaringan pungli ini tuntas diusut. "Kami tidak akan biarkan satu pun lolos. Aku kejar. Ini uang negara, uang rakyat. Petani sudah cukup susah, jangan diperas lagi," tegasnya.

Ia menegaskan, semua program bantuan pemerintah, tidak dipungut biaya, termasuk traktor dan alat mesin pertanian lainnya, bantuan benih, bantuan bibit tanaman perkebunan (kakao, lada, mente, pala, tebu, dan lainnya), dan program bantuan lain yang bersumber dari APBN. "Semua bantuan itu gratis. Kalau ada yang minta bayar, laporkan. Laporkan ke Lapor Pak Amran. Kami monitor langsung," katanya.

Terungkapnya kasus tersebut menurut Amran, berdasarkan Lapor Pak Mentan Amran. Data-data laporan cukup lengkap, bukan hanya nama oknumnya, tapi juga rekening penerima tranferan. "Dalam kasus ini ternyata bukan hanya orang dalam Kementan yang bermain, tapi juga ada pihak luar. Kami akan kirim ke penegak hukum," ujarnya. Untuk itu, Amran meminta Satgas Pangan dan pihak keamanan untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

Hingga kini, Lapor Pak Amran menunjukkan efektivitas tinggi. Dalam satu minggu, 2.890 lebih laporan masuk. Dari jumlah tersebut, kasus pungli di alasintan ada 99 titik, penjualan pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) 90 titik, pupuk subsidi 109 titik. Kasus yang sudah ditindak lanjuti sebanyak 504 laporan.

Bagi yang menemukan pelanggaran, Amran mendorong masyarakat berani melaporkan melalui Kanal Lapor Pak Amran 082311109390. "Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas laporannya. Itulah jasa-jasa Anda pada negara," ucapnya. **Ditjen PSP**



Meraih Kembali Swasembada Kedelai

Oleh : **Ir Muchlizar Murkan**
Pemerhati Kedelai

Kedelai merupakan sumber protein nabati utama yang kita konsumsi setiap hari dalam bentuk tempe, tahu, susu dll. Mengandung sekitar 35% protein yang sangat berguna untuk pertumbuhan tubuh, sumber energi, dan membuat pertumbuhan anak menjadi sehat, kuat dan pintar. Dibanding dengan sumber protein hewani seperti daging, ikan, susu dll, olahan kedelai jauh lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat luas.

Ironisnya tahu, tempe yang kita makan sehari hari itu. kedelainya kita impor dari Amerika, Brazil, dan Argentina (Kedelai GMO). Dari kebutuhan kita sekitar 2,9 juta ton setiap tahunnya, hampir 2,6 juta ton (± 85%) kita impor. sedangkan produksi dalam negri hanya berkisar antara 300.000 ton sampai 350.000 ton (15%). Dari mengimpor tersebut kita kehilangan devisa negara sekitar Rp. 20 triliun pertahun.

Di Amerika, Brazil dan Argentina, kedelai merupakan bisnis yang besar dan menarik, dan hampir 80 % diekspor keluar negeri .Tahun 2023 Produksi kedelai Amerika 113 juta ton, Brazil 152 juta ton dan Argentina 49 juta ton

Sebenarnya tahun 1992 kita pernah meraih "Swasembada Kedelai" dimana saat itu luas tanam mencapai sekitar 1,6 juta hektar dengan produksi sekitar 1,8 juta ton. Dalam kurun waktu 30 tahun, luas tanam kedelai selalu menurun. Diperkirakan saat ini luas tanam kedelai hanya sekitar 200.000 hektar sampai 300.000 hektar, dengan produksi sekitar 300.000 ton – 350.000 ton.

Kenapa sampai begitu? Beberapa penyebab sebagai berikut : 1) luas tanam selalu menurun, dalam kurun waktu 30 tahun kita kehilangan luas tanam kedelai sekitar 1,3 juta hektar, 2) petani tidak tertarik lagi menanam kedelai, karena keuntungan yang diterima lebih rendah jika dibandingkan menanam jagung, kacang tanah, atau kacang hijau, 3) harga jual saat panen tidak kondusif bagi petani, kalah bersaing dengan kedelai impor yang kualitasnya lebih baik, 4) terbatanya anggaran pembinaan, 5) terbatasnya kemampuan petani menerapkan anjuran teknologi sehingga produktivitas perhektar masih rendah (1,5 ton/ha) padahal potensi hasil bisa mencapai 2 ton sampai 3 ton/ha

Dilemanya dimulai disini, yang jelas masyarakat butuh sumber protein yang murah, tetapi petani tidak tertarik menanam kedelai, akhirnya kita selalu mengimpor, dan akibatnya banyak kehilangan devisa tetapi yang jelas kedelai cocok ditanam di Indonesia.

Momennya sangat tepat saat ini, untuk mendukung program ASTA CITA Presiden Prabowo Subianto untuk meraih swasembada pangan termasuk kedelai, mari kita dukung program Kementerian Pertanian untuk bangkit lagi menanam kedelai. Kita pasti bisa...

Saya yang sudah puluhan tahun ikut bergelut mengelola perkedelaian ini merasa terpanggil dan saya rasa juga banyak teman, senior diluar sana yang pasti mau ikut memberikan masukan dan saran membantu pemerintah meraih kembali swasembada kedelai.

Sebenarnya sudah banyak program program pemerintah untuk meningkatkan produksi kedelai, antara lain melalui program bantuan pemerintah (benih, pupuk dll) tapi belum mencapai hasil yang diharapkan.

Beberapa saran untuk dapat meraih swasembada kedelai kembali adalah sebagai berikut

Mempersiapkan areal tanam seluas 1,5 juta hektar secara bertahap selama 3 tahun sampai 4 tahun secara berkesinambungan, memanfaatkan lahan yang dulu pernah tanam kedelai, lahan tidur (slepping land), milik BUMN, Kementerian, dan Instansi yang terkait Lainnya.

Memotivasi petani untuk bangkit kembali menanam kedelai melalui program penyuluhan, edukasi, program yang menggairahkan petani untuk kembali menanam kedelai.

Merencanakan program bantuan yang tepat sasaran, waktu, dan target secara berkesinambungan.

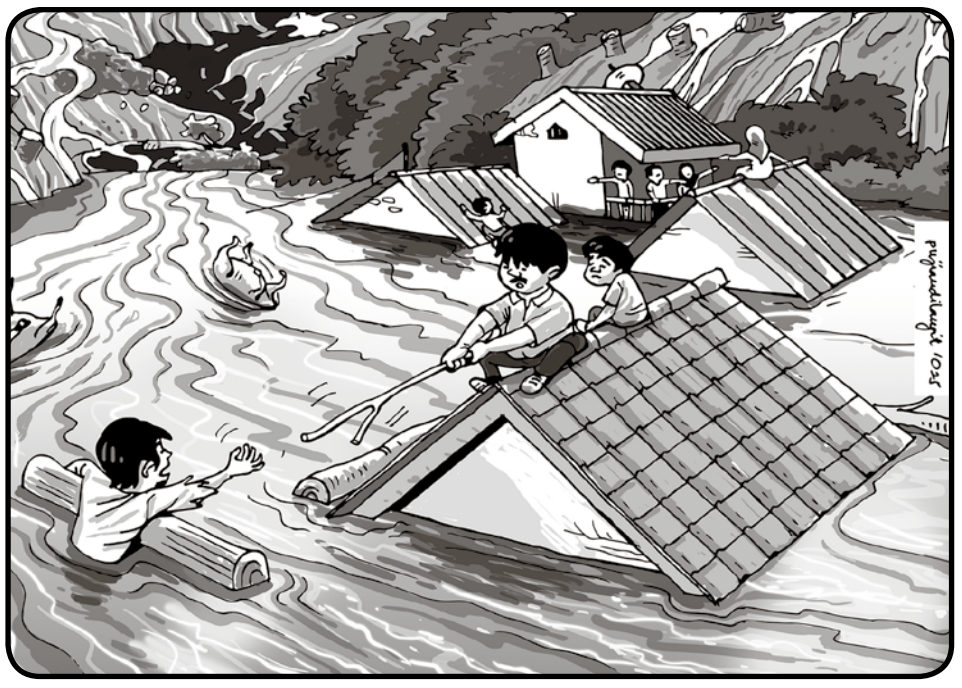
Membenahi kembali faktor pendukung program antara lain, sistem perbenihan yang berkesinambungan, penyuluhan, sistem penggadaan pupuk rhizobium, pembenah tanah dll.

Membenahi sistem tata niaga kedelai antara lain : harga jual kedelai petani/HPP kedelai sehingga petani bergairah lagi dalam menanam kedelai.

Jika semua program tersebut belum dapat berjalan dengan baik, saya mengusulkan membentuk suatu "BADAN" baru, yaitu Badan Otorita Penyangga Pangan (BOPP) yang berada dibawah Presiden / Menko Pangan, yang diberikan otoritas melakukan kegiatan produksi, prosesing, penyimpanan dan distribusi pangan. Kegiatan dilakukan pada lahan sekitar 1,5 juta sampai 2 juta hektar dilahan milik pemerintah antara lain kementerian (pertanian, kehutanan), BUMN (Perhutani, Perkebunan) dll. Serta lahan milik pemda.

Dimana BOPP ini seluruh karyawannya direkrut dari karyawan Kementerian / Lembaga terkait.

Apakah salah jika pemerintah ikut melakukan kegiatan produksi sendiri, meskipun hanya untuk komoditi tertentu? Dimana lahan tersebut sesuai kaidah pola tanam sebagian juga bisa di manfaatkan untuk menanam padi mendukung program swasembada beras (khusus untuk BOPP akan ada tulisan tersendiri)



Pulau Andalas Menangis

Kolom



Oleh: **Memed Gunawan**

Bangsa Indonesia kini tengah berduka. Tiga provinsi di Pulau Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat tertimpa bencana besar banjir dan longsor. Bencana kali ini bukan yang biasa, tapi luar biasa.

Update Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap perkembangan korban bencana Sumatera pada Sabtu (6/12) menyebutkan jumlah korban meninggal akibat bencana di tiga provinsi tersebut sebanyak 914 jiwa. Rinciannya, 359 jiwa meninggal di Aceh, 329 jiwa meninggal di Sumut, dan 226 jiwa meninggal di Sumbar. Sedangkan jumlah korban hilang di tiga provinsi tercatat sebanyak 389 jiwa.

Data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di tiga provinsi tersebut. Setidaknya, 3.600 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 3.700 rusak ringan. Ada 141.800 warga Sumbar yang terdampak, 1,5 juta di Aceh, dan 1,7 juta di Sumut. Total yang terdampak bencana ini adalah 3,3 juta jiwa.

Di Sumatera Utara, bencana terjadi serentak di sejumlah wilayah seperti Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Di Sumatera Barat, dampak bencana tercatat lebih meluas hingga mencakup 13–14 kabupaten/kota.

Di Sumatera Barat, daerah terdampak meliputi Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, Solok, Kota Pariaman, Pasaman Barat, Bukittinggi, serta beberapa kota/kabupaten lain yang juga mengalami banjir, longsor, hingga kerusakan infrastruktur.

Di Provinsi Aceh, banjir bandang juga dilaporkan terjadi di beberapa wilayah seperti Pidie, Aceh Besar, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Subulussalam, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Utara, dan Aceh Selatan.

Luasnya cakupan bencana menimbulkan pertanyaan besar, apakah penyebab bencana tersebut? Bukan sekadar faktor cuaca yakni siklon tropis senyar yang membawa curah hujan ekstrem. Tapi adanya kerusakan alam yang ada di sekitar lokasi bencana.

Dari media sosial dan peliputan berita di media massa, nampak jelas banyaknya kayu gelondongan yang terbawa arus banjir. Bukan kayu gelondongan biasa yaag rubuh terbawa banjir dan longsor. Tapi kayu yang bentuknya sudah 'mulus' tanpa ada lagi ranting dan daun, seperti batang pohon yang baru saja rubuh.

Kayu tersebut kemungkinan berasal dari campuran penebangan, pohon tumbang, serta sisa *land clearing* yang tidak dibersihkan. Bisa dari penebangan lama atau pembersihan lahan yang tidak tuntas. Jika terbawa arus air, kayu itu akan mengambang. Namun bisa juga dari penebangan kayu yang baru.

Kayu hasil tebangan pasti memiliki bekas gergaji yang jelas. Sementara kayu yang tumbang alami tidak menunjukkan pola potongan yang rapi. Namun dari gambar terlihat potongan kayu berukuran kecil dan besar. Dengan musibah banjir dan longsor di Pulau Sumatera ini menjadi koreksi bagi kita semua, perlunya pembenahan tata kelola lingkungan agar kejadian serupa tak terulang.

Mengutip buku *Melestarikan Alam Indonesia oleh Jatna Supriatna* (2008:89), Sumatera adalah pulau terbesar kelima di dunia dengan panjang 1.800 km dan lebar 400 km. Di dalamnya berlimpah sumber daya alam dan habitat. Pada awalnya, seluruh Pulau Sumatera tertutup oleh hutan. Tetapi sejak abad ke-19, hanya sekitar 25% saja yang masih berupa hutan.

Hervia Latuconsina, **Penjaga Kekayaan Hoya**

Gelaran Indonesian Breeder Award 2025 atau Anugerah Pemulia Indonesia (API) 2025 menjadi menegaskan posisi penting para pemulia tanaman dalam mem-perkuat ketahanan pangan nasional.



Kegiatan hasil kerjasama Perhimpunan Ilmu Pemuliaan Indonesia (PERIPI) bekerja sama dengan IPB University dan PT East West Seed Indonesia (EWINDO) kali mengusung tema "Breeding is Giving". Pemulia tanaman bukan hanya peneliti di laboratorium, tapi pahlawan pangan yang karya mereka dirasakan jutaan petani dan masyarakat.

Glenn Pardede, Managing Director EWINDO mengatakan, pemuliaan adalah profesi berdampak panjang. "Hasil kerja hari ini baru terlihat manfaatnya bagi generasi berikutnya. Kami berharap penghargaan ini menginspirasi lebih banyak mahasiswa dan peneliti muda bahwa 'Breeding is Giving' memberi untuk petani dan untuk bangsa," tuturnya.

Di tengah maraknya tanaman hias yang digemari masyarakat, satu nama mencuat sebagai penjaga kekayaan flora nusantara yaitu Hervia Latuconsina. Sosok ini telah berhasil mengoleksi dan melestarikan lebih dari 150 varietas Hoya.

Hoya, yang kerap disebut sebagai "anggrek mini" karena keunikan bentuk bunganya, sebenarnya merupakan tanaman lokal Indonesia yang masih tergolong langka. Tanaman epifit khas tropis yang terkenal dengan keindahan bunga dan daunnya.

Digemari Dunia

Hervia menjelaskan, proses konservasi dan pemberian nama untuk setiap varietas Hoya membutuhkan waktu puluhan tahun, bahkan melibatkan penelitian intensif di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). "Saat ini Hoya menjadi salah satu tanaman yang digemari di seluruh dunia. Untuk mendaftarkan varietas, kami harus melakukan konservasi jangka panjang agar tanaman bisa dideskripsi dengan benar," ujarnya.

Hervia menambahkan, hingga kini terdapat 10 varietas Hoya lokal yang telah tersertifikasi, seperti Sembada Rejo, Eksabinangun, Jenar Kluthuk, Planthaven, Padasan, Suweng Jambon, Hoya Sembada, Asteria Maron Sembada, Cinta Sembada, dan Jawa Sembada.

Semua varietas ini didaftarkan secara nasional oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai bentuk perlindungan terhadap kekayaan tanaman lokal. "Masih ada sekitar 40 varietas Hoya lainnya yang sedang dalam proses pendaftaran. Kami berharap varietas-varietas ini bisa segera mendapatkan sertifikasi resmi," tambahnya.

Hervia, yang juga Ketua Perkumpulan Pelestari Tanaman Hoya Indonesia (PPTHI) menegaskan pentingnya menjaga Hoya sebagai sumber daya genetik spesifik lokasi, agar terhindar dari biopiracy. "Hoya bukan hanya indah, tetapi juga aset bangsa yang sangat berharga," ujarnya.

Selain sebagai tanaman hias, Hoya memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan. Tanaman ini dapat dibudidayakan melalui biji atau stek, termasuk metode kultur jaringan. Dengan perawatan yang tepat, Hoya bisa tumbuh hingga tiga meter dengan bunga yang tahan lama dan daunnya yang menawan.

Di Rumah Lavia, Sleman, Hervia menanam berbagai jenis Hoya. Penanaman dilakukan di tempat teduh, menghindari sinar matahari langsung, dan penyiraman hanya saat media tanam kering.

Media tanam yang digunakan cukup sederhana, seperti campuran sekam dan kayu lapuk, dengan pemupukan rutin dua minggu sekali. "Hoya bisa diletakkan di teras, dekat jendela, atau halaman dengan naungan. Jika ingin full sun dan rain, tanaman harus dibiasakan sejak awal," terang Hervia.

Menurutnya, keindahan Hoya bukan hanya pada bunganya, tetapi juga daunnya yang unik. Bunga Hoya pun memiliki keistimewaan setelah mekar, bagian kelopaknya akan tumbuh kembali dalam satu bulan setelah bunga tua rontok.

Rumah Lavia juga menjadi sebuah lembaga kursus dan pelatihan merangkai bunga kini hadir di Yogyakarta. Hervia mengaku prihatin akan kurangnya wadah meningkatkan skill merangkai dan tidak adanya teori baku akan kemampuan ini. Bukan tanpa alasan, menurut Hervia, potensi di Indonesia terkait industri merangkai bunga untuk dekorasi atau hiasan sangat terbuka luas.

Hervia juga aktif melibatkan anak-anak muda dalam pelestarian Hoya. Ia menekankan, pendekatannya bukan sebagai pemburu tanaman, tetapi sebagai "pendekar Hoya" yang ikut merawat kekayaan alam. "Saya membuat komunitas pelestari dan menampung hoya-hoya yang mereka temukan di hutan untuk dibudidayakan. Dengan begitu, anak-anak muda belajar menghargai tanaman, bukan menjualnya begitu saja," ungkapnya.

Selain itu, Hervia sering menggelar pameran dan workshop gratis untuk masyarakat dan kolektor muda. Ia ingin menumbuhkan kecintaan terhadap tanaman lokal, sekaligus menumbuhkan ekonomi kreatif berbasis flora nusantara. "Kalau kita menjalani dengan cinta, merawat Hoya jadi tidak terasa sulit. Yang penting kita menghargai setiap prosesnya," katanya.

Dengan dedikasi dan cintanya terhadap Hoya, Hervia Latuconsina menjadi inspirasi bagi pelestari tanaman Indonesia. Lebih dari sekadar hobi, upaya konservasinya kini berperan penting menjaga warisan flora nusantara agar tetap dikenal dunia. **Gsh/Yul**

BUDIDAYA HOYA, Kian Menarik Pencinta Tanaman Hias



Indonesia memiliki kekayaan alam dan plasma nutfah yang melimpah. Salah satunya tanaman hoya merupakan plasma nutfah Indonesia yang harus diselamatkan. Di dalam negeri, umumnya masyarakat minimnya pengetahuan tentang tanaman yang biasa tumbuh liar tersebut.

Masyarakat Gunung Kidul menganggapnya sebagai benalu yang menghambat pertumbuhan tanaman. Akibatnya tanaman hoya dianggap hama dan cenderung diberantas. Padahal, tanaman Hoya adalah tumbuhan epifit yang tumbuh dan berkembang di atas tumbuhan lain dengan cara non parasit.

Artinya, mereka hanya menumpang tempat hidup dengan merambah dan membelit, namun tidak merugikan tumbuhan inangnya. Tanaman ini dapat merambat hingga mencapai panjang 60 sentimeter hingga 1,2 meter.

Jika dilestarikan dan berbunga, maka tanaman yang dianggap benalu tersebut ternyata berharga. Diperkirakan sampai tahun 2006, Indonesia memiliki sekitar 50-69 jenis Hoya, terbesar berada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.

Hoya, juga dikenal sebagai tanaman lilin atau bunga porselen. Dengan bentuk bunga yang unik seperti bola atau payung dan daun lilin yang berkilau, tanaman hias ini kian menarik perhatian banyak pecinta tanaman hias. Karena perawatannya mudah, menjadikan tanaman hoya pilihan ideal untuk pemula maupun kolektor tanaman hias.

Menanam Hoya

Bagaimana menanan dan merawat tanaman hoya? Ada beberap tips membudidayakan tanaman hoya. Saat menanam hoya perlu memperhatikan lokasi yang ideal. Jika ingin menanam dalam ruangan, maka sebaiknya meletakkan hoya di area yang menerima sinar matahari tidak langsung, seperti jendela menghadap selatan atau barat.

Perlu diketahui bunga hoya membutuhkan cahaya yang cukup, tetapi hindari sinar matahari langsung yang terlalu kuat, terutama pada siang hari. Pencahayaan yang terlalu intens dapat menyebabkan daun terbakar. Hoya membutuhkan sinar matahari tidak langsung selama 6 jam sehari.

Karena itu, letakkan tanaman di tempat yang mendapat sinar matahari pagi atau sore yang lembut. Jika ditempatkan di dalam ruangan, maka letakkan di dekat jendela yang memberikan cahaya yang tersebar.

Sebaiknya gunakan tiang atau teralis untuk membimbing tanaman untuk merambat. Jika ingin menanam di luar ruangan, maka hoya bisa ditanam di pot atau garden bed dengan tanah yang memiliki drainase baik.

Saat menanam hoya pilih pot yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Karena itu, pilihlah pot yang memiliki lubang drainase yang memadai di bagian bawahnya. Lubang drainase ini akan memastikan bahwa kelebihan air dapat keluar dari pot, mencegah akar tanaman dari genangan air yang dapat menyebabkan pembusukan.

Pot dengan lubang drainase juga memungkinkan udara untuk mengalir dengan baik di sekitar akar tanaman. Fungsi lainnya adalah membantu menjaga kelembaban yang tepat dan mencegah akar dari kelembaban berlebih.

Kondisi tanam juga perlu mendapat perhatian. Waktu terbaik menanam hoya adalah musim panas. Namun jika iklim dingin atau suhu di bawah 10°C, sebaiknya menanam hoya di pot agar mudah dipindahkan ke dalam ruangan.

Untuk media tanam, gunakan tanah sukulen atau tanah pot yang dicampur perlit untuk meningkatkan drainase. Sedangkan pH ideal untuk hoya adalah 6,1-7,5 (sedikit asam hingga netral).

Merawat si Bunga Lilin

Setelah proses penanaman dilakukan, perawatan menjadi faktor penting untuk bisa mendapatkan hasil tanaman yang baik. Hal penting dalam perawatan adalah penyiraman yang tepat sangat penting untuk kesehatan bunga hoya.

Pertama-tama yang perlu mendapat perhatian adalah pastikan tanah benar-benar kering sebelum menyiram kembali. Karena itu biarkan lapisan atas media tanam mengering sebelum melakukan penyiraman ulang.

Hindari genangan air untuk mencegah pembusukan akar. Sebab, terlalu banyak air dapat merusak akar, sementara tanah yang terlalu kering dapat menghambat pertumbuhan. Pada musim dingin, kurangi frekuensi penyiraman karena tanaman sedang beristirahat.

Bunga hoya menyukai kelembaban yang sedang hingga tinggi. Jika udara dalam ruangan terlalu kering, tanaman dapat mengalami masalah seperti daun yang menguning atau kering. Kita bisa menyemprotkan air di sekitar tanaman atau meletakkan nampan berisi air di dekatnya untuk meningkatkan kelembaban udara.

Pemberian pupuk secara teratur membantu bunga hoya tumbuh subur dan mekar dengan cantik. Pupuk cair dengan kandungan nutrisi seimbang cocok untuk bunga hoya. Pupukkan tanaman setiap 4-6 minggu selama musim semi dan musim panas, namun hindari memberi pupuk saat tanah kering atau tanaman belum beradaptasi setelah pemindahan.

Dalam perawatan pemangkasan perlu dilakukan untuk membantu menjaga bentuk tanaman dan merangsang pertumbuhan baru. Lakukan pemotongan bagian yang panjang atau tidak sehat atau daun yang kering untuk menjaga tampilan yang rapi. Kita dapat memotong bunga yang sudah layu untuk mencegah energi tanaman terbuang pada pembentukan biji.

Pemangkasan tanaman setelah bunga layu berfungsi untuk merangsang pertumbuhan baru. Ingat, jangan memotong tangkai bunga, karena hoya sering kali menumbuhkan bunga sekunder di tangkai yang sama.

Pengendalian hama penyakit

Saat menanam hoya kadang juga terdapat hama dan penyakit. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan itu menjadi penting agar tanaman tetap sehat. Hama yang kadang menyerang daun hoya adalah kutu daun, kutu putih, dan tungau laba-laba. Karena itu, bersihkan dengan kain basah atau semprot dengan minyak nimba.

Hoya rentan terhadap infeksi jamur seperti hawar botrytis, yang menyebabkan daun bagian dalam berwarna abu-abu atau coklat. Jika terserang jamur, maka segera pindahkan tanaman yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran jamur.

Untuk mencegah serangan hama dan penyakit, disarankan menggunakan campuran minyak mimba dan air sebagai solusi untuk mengatasi hama penghisap getah pada tanaman. Semprotkan campuran ini secara merata ke seluruh bagian tanaman dengan menggunakan semprotan, sehingga hama dapat terbunuh efektif.

Perhatikan juga tanda-tanda masalah seperti daun menguning, kerut, atau bunga yang tidak mekar dengan baik. Ini bisa menjadi tanda masalah seperti serangga atau penyakit. Jika kita menemui masalah tersebut, maka segera ambil tindakan pencegahan atau pengobatan yang sesuai.

Jika ingin memperbanyak hoya, metode stek batang menjadi cara yang paling mudah. Caranya, potong batang sehat minimal dua ruas. Kemudian, masukkan stek ke air dan letakkan di tempat teduh. Setelah akar terbentuk, pindahkan ke pot dengan tanah berdrainase baik. Alternatif lainnya, celupkan batang ke bubuk hormon perakaran sebelum menanam langsung di tanah pot. Selamat mencoba.

Yul (dari berbagai sumber)

Urban Farming
Tak lagi Sebatas Gaya Hidup



Bagi masyarakat di ibukota negara, DKI Jakarta dan kota-kota besar, usaha pertanian menjadi sesuatu yang langka. Bukan hanya kesibukan masyarakatnya yang sangat tinggi dengan hiruk pikuknya, keterbatasan lahan menjadi kendala tersendiri.

Meski tantangan itu kini mulai bisa teratasi. Dengan konsep urban farming, kegiatan usaha pertanian di kota besar menjadi sebuah keniscayaan. Bahkan bisa menjadi ladang penghasilan, khususnya kaum ibu rumah tangga.

Kegiatan urbang farming (pertanian kota) lah yang terus digaungkan Pemerintah DKI Jakarta. Sebagai ibukota negara, sejak beberapa tahun terakhir memang banyak masyarakat perkotaan yang mulai menekuni kegiatan pertanian. Terlebih saat wabah pandemi Covid-19, ketika masyarakat harus berdiam di rumah saja.

Salah satu wilayah di DKI Jakarta yang kini banyak tumbuh penggiat urban farming adalah Jakarta Timur. Di wilayah tersebut memang lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian relatif masih ada.

Berbagai kegiatan produktif seperti budidaya pertanian, perikanan, peternakan dan pengolahan hasil panen telah banyak ditekuni. Diantaranya, di Oemah Rempah Rolas, Pokja 3 Kel Pondok Bambu, Urban Farming Kantor Kelurahan Kebon Manggis.

Selain itu Komunitas Anggur Jakarta, Kelompok Wanita Tani (KWT) Melati, d'juice, Madu Pramuka, Agriyaponik, Kelompok Tani Cempaka, Oemah Betawie dan Filosofi Lebah Nusantara, serta Kebun Teras Jiwa.

Urban farming juga menyasar lembaga pemasyarakat seperti Lapas Kelas 1 Cipinang dan Rutan Kelas 1 Pondok Bambu. Ada juga yang berlokasi di RSUD Cipayung, Terminal Pulo Gebang dan lokasi Tol Becak Kayu.



Data Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) DKI Jakarta mencatat, hingga kini terdapat 5.910 pelaku urban farming yang tergabung dalam 521 kelompok tani di seluruh wilayah ibu kota. Mereka tersebar di rumah ibadah, sekolah, perkantoran, hingga lembaga pemasyarakatan.

Untuk membantu penggiat urban farming, Pemprov DKI Jakarta menyediakan pelatihan, pendampingan penyuluh, sarana produksi, hingga kemitraan dengan swasta dan BUMD. Semua ini sejalan dengan Desain Besar Pertanian Perkotaan 2018-2030, yang menekankan pentingnya pertanian berbasis ruang. Dengan pendekatan vertikal, atap gedung, dinding bangunan, bahkan gang sempit bisa disulap menjadi lahan produktif.

Pasar *urban farming*

Menggeliatnya urban farming di Ibukota Negara, ternyata memerlukan pasar. Untuk membantu pelaku usaha urban farming, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Pasar Tumbuh. Seperti yang berlangsung di Halaman Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur. Kegiatan pasar tumbuh mulai pukul 07.00-12.00 WIB.

Kegiatan ini sebagai sebuah Inisiatif yang lahir dari semangat kolaborasi dan pertumbuhan komunitas urban di Jakarta Timur. Kegiatan tersebut hasil kolaborasi Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur melalui Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan, dan Pertanian (Sudin KPKP) Kota Administrasi Jakarta Timur dan penggiat urban farming.

Pasar Tumbuh ini dalam rangka memperkuat Ketahanan Pangan, Promosi Urban Farming dan Pemberdayaan Para Penggiat Urban Farming (pertanian, perikanan, peternakan) serta UMKM Jackprener di Jakarta Timur. "Pasar Tumbuh ini tentunya sangat kita dukung, kami berharap semua Sudin seperti ini konsepnya," kata Kepala Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok saat mengunjungi lokasi Pasar Tumbuh.

Hasudungan berharap, pelaksanaan pasar tumbuh dapat menjadikan urban farming sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat kota, termasuk di Jakarta Timur. Selain itu, sebagai sarana sosialisasi dan silaturahmi antara para penggiat urban farming dengan Pemerintah Kota, menyediakan ruang edukasi untuk penggiat dan meningkatkan perekonomian kota.

Ajang pasar tumbuh juga menjadi sarana Pemda memberikan fasilitas berbagai layanan. Misalnya, vaksinasi Rabies Hewan Kesayangan dan Konsultasi Hama Penyakit Tanaman. Ada juga kegiatan workshop Budidaya Anggrek, Praktek Pembuatan Trichokompos dan Pengendalian Organisme Hama Penyakit, Rapid Test Kit Produk Segar Asal Tumbuhan, Pangan Murah, Senam Bersama, serta pembagian bibit gratis.

Sementara peserta tumbuh menampilkan hasil budidaya pertanian, perikanan dan peternakannya mulai dari sayuran sehat baik hasil budidaya hidroponik maupun konvensional. Ada buah dan sayuran segar, melon, anggur, pisang, alpukat, telur, tempe, tomat, labu air, terong, cabe, susu, jus, kopi, jamu, bibit tanaman.

Berbagai aneka makanan berbahan dasar hasil pertanian, perikanan, peternakan serta minuman segar lainnya hasil urban farming di 10 Kecamatan Jakarta Timur nampak di lokasi Pasar Tumbuh.

Sesuai namanya, omset pasar tumbuh pun semakin bertumbuh. Data Sudin KPKP Jakarta Timur, sejak diluncurkan Agustus lalu omset masih sekitar Rp 22,56 juta. Namun pada September Rp 22,72 juta, kemudian Oktober Rp 31,25 juta dan November ini berhasil meraih Rp 57,44 juta.

Urban farming kini tak hanya sebatas gaya hidup, tapi menjadi peluang bisnis bagi warga ibukota DKI Jakarta. **Indri/Yul**

CEGAH PEREDARAN PESTISIDA PALSU!

Jangan Sampai Petani Menjadi Korban

Komitmen pemerintah dalam menekan peredaran pestisida palsu menjadi langkah penting untuk menjaga keberhasilan panen, produktivitas pertanian, dan kesejahteraan petani. Produk palsu memiliki mutu tidak terjamin, tidak efektif mengendalikan hama, dan menyebabkan kerugian besar hingga gagal panen. Modus pemalsuan umumnya meniru merek terkenal dan menawarkan harga lebih murah sehingga menipu petani yang tidak menyadari perbedaannya. Petani dihimbau membeli produk di toko resmi, memeriksa izin dan label, serta waspada terhadap harga yang tidak wajar.

Sebagai dukungan terhadap pencegahan praktik pemalsuan, PT Fajar Nasional Cipta (FNC) bersama Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Brebes mengadakan Sosialisasi Pencegahan Peredaran Pestisida Palsu pada 04 Desember 2025 di Desa Krakahan, Brebes. Lebih dari 100 petani dari empat kecamatan hadir dalam kegiatan ini.

Materi sosialisasi disampaikan oleh:

- Budi Hanafi, S.T., M.A.P – KP3, Kementerian Pertanian
- Iskandar Agung, S.Pi., M.Si – Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Brebes
- Dudy Kristyanto – Business Development Manager FNC



Petani Brebes dalam acara sosialisasi "Cegah Penggunaan Pestisida Palsu" , kolaborasi K3P dan FNC

Direktur FNC, Syarifah Nuly Nazlia, menyampaikan bahwa FNC berkomitmen mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan saprodi berkualitas, distribusi yang sesuai ketentuan, dan edukasi penggunaan pestisida yang tepat, aman dan berkelanjutan.

Dalam sesi tanya jawab, disoroti cara petani membedakan produk asli dan palsu. FNC menegaskan pentingnya mengenali kemasan, mencermati label, dan memastikan pembelian melalui jalur resmi. Narasumber dari Kementerian Pertanian, Budi Hanafi mengingatkan bahwa pestisida asli telah melalui uji ketat sebelum terdaftar. Petani diminta lebih teliti membaca informasi produk, memeriksa nomor pendaftaran, serta segera melaporkan jika menemukan indikasi pemalsuan melalui Hotline KP3 – 24 jam layanan.

Dinas Pertanian Brebes diwakili oleh Iskandar Agung, menjelaskan modus penyimpangan yang umum ditemukan, yaitu produk palsu, tanpa izin edar, atau komposisi tidak sesuai spesifikasi. Pemerintah daerah menegaskan komitmen menekan peredaran pestisida ilegal di wilayah Brebes serta mendorong sosialisasi berkelanjutan di berbagai sentra pertanian.

Narasumber menutup kegiatan dengan ajakan kolaborasi. Pemerintah, produsen, distributor, dan petani memiliki peran bersama dalam pengawasan. Penggunaan pestisida harus sesuai anjuran pada label dan dilengkapi alat pelindung diri. FNC melalui Dudy Kristyanto menegaskan komitmen mendukung petani untuk mencapai 'Hasil Maksimal dengan Risiko Minimal, serta Upaya dalam mengembangkan sosialisasi pencegahan pemalsuan di berbagai wilayah Indonesia.■

TANI **SUKSES**

Suwandi, Nutrisi Tepat Produksi Berlipat

Masih berusia muda bukan berarti minim pengetahuan bercocok tanam. Suwandi salah satunya. Petani asal Brebes ini demikian menguasai teknik budidaya bawang merah kendati usianya masih begitu belia.


Suwandi, Petani Brebes

Ditemui saat tengah mengikuti acara Sosialisasi "Cegah Penggunaan Pestisida Palsu" di Brebes Jawa Tengah beberapa waktu lalu, Suwandi memaparkan trik-trik untuk dapat sukses bertanam bawang merah.

Menurut petani milenial berusia 29 tahun itu, banyak aspek yang harus diperhatikan jika ingin berhasil membudidayakan tanaman bawang merah. Diantaranya petani harus bisa menjaga tanamannya terbebas dari serangan hama terutama hama ulat grayak.

Pengendalian ulat biasa dilakukannya dengan mengaplikasikan insektisida sistemik sejak awal pertumbuhan tanaman. "Dengan sedini mungkin melakukan penyemprotan insektisida bisa dicegah serangan ulat di batang dan daun, pada akhirnya umbi bawang merah dapat berkembang optimal," tandasnya.

Aplikasikan Boomflower

Disamping sesegera mungkin melaksanakan pencegahan serangan hama ulat, Suwandi menekankan pentingnya pemberian nutrisi yang tepat di pertanaman bawang merah.

Sebagaimana manusia, tanaman bawang juga membutuhkan asupan nutrisi atau gizi yang cukup untuk dapat tumbuh dan berkembang, yang berdampak dapat mendorong pertumbuhan umbi secara optimal.

Untuk pemenuhan nutrisi tanaman, pihaknya selama ini menggunakan Boomflower produksi FNC. Pengaplikasiannya dilakukan di hari ke-37 setelah tanam (HST) .

Berkat pengaplikasian nutrisi Boomflower daun menjadi lebih hijau dan kokoh sehingga umbi bawang merah lebih besar jika dibandingkan dengan yang tanpa pengaplikasian Boomflower .

Didukung dengan pemberian pupuk yang tepat maka pengaplikasian nutrisi tanaman Boomflower nyatanya juga bisa mendorong diproduksinya umbi yang berkualitas. Yakni daya simpan umbi bisa lebih meningkat. " Karena bisa disimpan ber bulan-bulan maka kita aman bisa menyimpan dan baru melepas setelah harganya tinggi di pasaran," tutur pria yang kini bertempat tinggal di Desa Sengon Brebes itu.

Dengan tatalaksana pemeliharaan yang benar serta terus mengaplikasikan nutrisi tanaman produktivitas pertanamannya di lahan seluas 6.800 meter persegi bisa dijaga terus tinggi. Hitungan kasarnya per hektar bisa diraih sekitar 15 ton umbi bawang merah.

"Sampai saat ini saya masih terus mengaplikasikan nutrisi tanaman Karena dengan cara ini saya bisa mengamankan aspek produksi juga aspek pemasaran bawang merah produksi kami," jelas petani kelahiran Jombang Jatim itu.■

Danantara Indonesia

Perkebunan Nusantara

sinergi gula nusantara

nusakita

DARI BUMI SENDIRI

GULA KRISTAL PUTIH

Produced by:
sinergi gula nusantara

INFORMASI PEMBELIAN

0857-0178-2021

ALAMAT DIVISI PEMASARAN DAN PELANGGAN, PT SINERGI GULA NUSANTARA
JLN JEMBATAN MERAH NO. 3-11 SURABAYA

Pemerintah REHABILITASI TERNAK di Lokasi Bencana Sumatera





Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat membawa duka bagi Indonesia. Bukan hanya harta yang hilang, ratusan korban manusia juga harus kehilangan nyawa. Begitu juga banyak ternak milik masyarakat yang mati dan hilang.

Dalam upaya pemulihan sektor peternakan pascabencana di Pulau Sumatera, pemerintah terus melakukan percepatan. Di Sumatera Barat, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mulai menyalurkan bantuan obat-obatan ternak guna mengamankan kesehatan ternak yang terdampak parah.

Bantuan diserahkan langsung Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, dan disaksikan Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy. Penyerahan ini menjadi penanda dimulainya program pemulihan kesehatan hewan secara lebih terstruktur.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Sumbar, Sukarli, menyampaikan bahwa kondisi darurat di lapangan menuntut percepatan bantuan medis. Banyak ternak warga ditemukan dalam keadaan terluka, stres, hingga terpapar berbagai risiko penyakit akibat lingkungan yang rusak.

“Bencana tidak hanya merusak rumah dan fasilitas umum, tapi juga menghantam sumber penghidupan peternak. Ternak banyak yang terluka, terinfeksi, bahkan hilang. Bantuan dari Ditjen PKH sangat vital untuk penyelamatan ternak warga,” ujar Sukarli.

Bantuan tahap pertama terdiri atas antibiotik, analgesik, antihistamin, vitamin injeksi, disinfektan cair, spray luka, hingga obat cacing. Ribuan botol dan unit obat tersebut didistribusikan ke daerah dengan dampak terberat seperti Agam, Tanah Datar, dan Limapuluh Kota. Balai Veteriner Bukittinggi turut memperkuat pasokan dengan mengirim ribuan spuit dan jarum suntik untuk mempercepat tindakan medis.

Tim dokter hewan Kementan bersama tenaga medis Disnakeswan kini bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain untuk melakukan pemeriksaan ternak, penanganan luka, pencegahan infeksi, dan pendataan kerugian ternak. Selain penyelamatan fisik, tim juga mengantisipasi potensi wabah penyakit akibat pencemaran limbah pascabencana.

Wakil Gubernur Vasko Ruseimy menilai bantuan kesehatan hewan merupakan langkah strategis karena banyak keluarga di Sumbar menggantungkan hidup dari hasil ternak. “Ini langkah cepat yang sangat dibutuhkan. Bagi peternak, ternak adalah tabungan dan sumber nafkah. Intervensi kesehatan hewan harus menjadi prioritas,” kata Vasko.

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menegaskan bahwa pemulihan ekonomi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari pemulihan sektor peternakan. Menurutnya, banyak keluarga yang kehilangan mata pencaharian karena sapi, kambing, dan unggas mereka hilang atau mati. “Pemulihan bukan hanya membangun kembali rumah, tetapi juga mengembalikan kehidupan masyarakat. Ternak adalah tulang punggung ekonomi keluarga,” ujarnya.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menggarisbawahi komitmen penuh Kementan untuk memastikan ternak yang selamat tetap sehat dan produktif. Menurutnya, dukungan medis akan terus ditambah sesuai kebutuhan lapangan.

“Penanganan kesehatan hewan adalah bagian penting dari pemulihan ekonomi. Ternak harus segera pulih agar pendapatan peternak tidak terhenti terlalu lama. Kami siap menambah bantuan sesuai kondisi daerah terdampak,” tegas Agung.

Upaya pemulihan di sektor peternakan ini berjalan seiring dengan bantuan untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat lainnya. Meski bantuan tersebut lebih luas mencakup kebutuhan pangan dan logistik, Kementan menekankan bahwa pemulihan pertanian dan peternakan merupakan satu kesatuan yang saling menguatkan.

Rehabilitasi Sektor Pertanian

Sementara itu Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan bahwa pemerintah menjamin petani dan peternak tidak boleh dirugikan akibat bencana. Pemerintah telah menyiapkan langkah rehabilitasi, baik untuk lahan pertanian. Tugas utama pemerintah adalah memastikan petani bisa bangkit. Tanah yang rusak akan diolah kembali, lahan yang puso dibantu penuh, dan ternak yang terdampak diberikan pelayanan kesehatan serta bantuan lanjutan.

”Tugas kita (Kementerian Pertanian, red) adalah merekonstruksi pertanian pasca bencana. Apakah yang terdampak kita berikan bantuan benih gratis atau alat mesin pertanian. Jadi tidak berlama-lama agar ekonomi bisa berjalan kembali,” tuturnya. Diperkirakan, sekitar 40 ribu hektar lahan pertanian di Aceh, Sumut, dan Sumbar terdampak banjir, dan sektor peternakan juga mengalami kerugian besar. Pemerintah memastikan bantuan seperti benih dan alsintan akan terus diberikan.

Sebelumnya, Mentan Amran meninjau langsung wilayah terdampak di Sumatera Utara. Pemerintah memastikan proses pemulihan lahan dan peternakan diambil alih sepenuhnya pemerintah pusat agar masyarakat dapat segera kembali berproduksi. Bahkan Pemerintah akan melakukan langkah cepat untuk memulihkan lahan pertanian yang mengalami kerusakan berat atau puso akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera.

Penanganan ini menjadi tanggung jawab penuh pemerintah dan diharapkan pada awal tahun depan sudah mulai direhabilitasi. “Untuk lahan yang rusak terkena bencana, pemerintah sudah menyiapkan anggarannya. Kita sekarang masih mengumpulkan data. Kami berharap Januari bisa langsung bergerak,” kata Amran.

Untuk membantu korban bencana di Sumatera, pemerintah menggelontorkan bantuan senilai Rp 1,2 triliun. Sementara yang terkumpul dari Aksi Kementan Peduli sebanyak Rp 75 miliar. Semua bantuan yang pemerintah kirim ke lokasi bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dalam bentuk barang.

“Ini dalam bentuk barang. Saya ulangi pemberangkatan pertama kedua itu dalam bentuk barang bantuan dan tidak ada pembelian bentuk barang,” kata Amran saat jumpa pers pelepasan 153 truk yang mengangkut bantuan menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Timur di Jakarta, Kamis (11/12).

Langkah tanggap bencana dan pemulihan yang dilakukan Kementan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam melindungi petani. Kementan berkomitmen agar seluruh upaya tersebut tidak hanya berfokus pada rehabilitasi lahan, tetapi juga memastikan keberlanjutan produksi pangan. **Humas Ditjen PKH**

Gerak Cepat Pulihkan
Peternak Terdampak Semeru



Kementerian Pertanian kembali menunjukkan respons sigap dalam menangani berbagai bencana alam di Tanah Air. Bukan hanya menyalurkan bantuan untuk wilayah terdampak di Sumatera, pemerintah juga mengarahkan perhatian penuh ke Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang kembali terpukul akibat erupsi Gunung Semeru.

Salah satu sektor yang terdampak paling signifikan adalah peternakan, mengingat wilayah ini merupakan salah satu sentra produksi ternak penting di Jawa Timur. Seperti diungkapkan Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah) bahawa kekuatan ekonomi daerah sejati tumbuh dari desa. Salah satu buktinya adalah peternakan rakyat yang dikelola langsung masyarakat dan menjadi tulang punggung ketahanan pangan Lumajang.

Menurut Bunda Indah, peternakan rakyat merupakan potret ekonomi yang berakar kuat di masyarakat Lumajang. Bahkan di tengah ketidakpastian ekonomi global, sektor ini terbukti tangguh karena berbasis pada kerja kolektif, gotong royong, dan nilai-nilai lokal. “Selama desa berproduksi, Lumajang akan tetap berdiri tegak. Peternak adalah penjaga ekonomi rakyat sekaligus benteng ketahanan pangan kita,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Agung Suganda menegaskan, pemerintah berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi para peternak. Menurutnya, keberlangsungan ternak merupakan bagian vital dari pemulihan ekonomi keluarga di wilayah rawan bencana.

“Fokus kami adalah memastikan ternak yang selamat tetap sehat, terpantau, dan dapat kembali produktif. Penanganan kesehatan hewan adalah bagian penting dari pemulihan, karena ternak bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga tabungan dan sumber kehidupan bagi peternak,” ujar Agung.

Respons cepat Ditjen PKH diwujudkan melalui rapat koordinasi khusus. Pertemuan tersebut melibatkan unit-unit lingkup Ditjen PKH, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Lumajang, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Rapat ini bertujuan memetakan dampak di lapangan, mulai dari kondisi ternak, ketersediaan pakan, fasilitas penampungan, hingga perlindungan bagi petugas dan relawan.



Dari hasil pemetaan, kebutuhan mendesak yang langsung diidentifikasi adalah ketersediaan pakan bagi ternak yang berhasil diselamatkan warga. Banyak peternak terpaksa memindahkan hewan mereka ke lokasi lebih aman dalam waktu singkat, sehingga pasokan pakan menjadi kritis. Menindaklanjuti hal ini, Kementan bergerak cepat menyalurkan 14 ton pakan ternak berupa hijauan segar, silase, dan pakan komplit (*complete feed*).

Pengiriman dilakukan bertahap sejak akhir November hingga awal Desember melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PKH, seperti BBIB Singosari, BBPTUHPT Baturraden, dan Balai Embrio Ternak Cipelang. Selain dukungan pakan, berbagai kebutuhan medis untuk hewan juga dikirimkan ke Lumajang. Bantuan berupa obat-obatan, vitamin, desinfektan, serta alat pelindung diri (APD) disiapkan melalui Direktorat Kesehatan Hewan, BBVET Wates, dan Pusat Veteriner Farma (Pusvetma).

Prinsip Kesejahteraan Hewan

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, I Ketut Wirata, menegaskan pentingnya penanganan hewan sesuai prinsip kesejahteraan hewan, terutama pada masa darurat. “Kami berkomitmen memastikan penanganan hewan terdampak tetap sesuai kaidah kesejahteraan hewan. Keselamatan petugas lapangan juga prioritas. Mereka bekerja dalam kondisi berisiko tinggi, sehingga perlindungan yang memadai menjadi hal wajib,” ujarnya.

Dalam kondisi bencana seperti erupsi, petugas dinilai memiliki peran krusial sebagai garda terdepan penyelamatan ternak. Selain memastikan kesehatan hewan, mereka juga berperan mencegah terjadinya penyebaran penyakit dari bangkai ternak yang tidak tertangani.

Untuk memastikan ternak dapat ditampung dengan aman selama masa darurat, Kementan juga menyiapkan kandang penampungan sementara. Sarana ini dikelola Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) sebagai lokasi evakuasi ternak, sekaligus tempat pemantauan kesehatan.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan DKPP Lumajang, Endra Novianto, mengapresiasi respons cepat pemerintah pusat. “Kerja sama lintas sektor seperti ini sangat penting. Bantuan pakan dan dukungan teknis dari Kementan sangat membantu kami mempercepat penanganan di lapangan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris DKPP Lumajang, Rofi’ah, yang menerima langsung bantuan APD dari BBVF Pusvetma, menggambarkan kondisi lapangan yang mulai terkendali, namun masih penuh tantangan. Ia menyebut bahwa evakuasi, pemeriksaan kesehatan hewan, dan pemusnahan bangkai masih terus dilakukan secara bertahap.

“Situasi perlahan membaik, tetapi beban petugas masih berat. Banyak pekerjaan yang membutuhkan perlindungan memadai. Bantuan APD ini sangat membantu petugas bekerja lebih aman,” ujar Rofi’ah.

Dukungan APD tersebut merupakan bagian dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) 2025 BBVF Pusvetma, berupa 25 pasang sepatu bot dan 25 helm keselamatan. Kepala BBVF Pusvetma, Edy Budi Susila, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral lembaganya. “Kami ingin memastikan para petugas lapangan bekerja dengan perlindungan terbaik. Mereka yang berada di garis depan harus dipastikan keselamatannya,” ujarnya.

Upaya pemulihan sektor peternakan di Lumajang terus diperkuat melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ditjen PKH berkomitmen menjaga komunikasi agar semua kebutuhan peternak dapat dipenuhi, terutama bagi mereka yang kehilangan ternak atau masih harus memindahkan hewan ke lokasi aman.

Dengan semakin lengkapnya dukungan logistik, pakan, peralatan kesehatan, serta APD bagi petugas, pemerintah optimistis proses pemulihan akan berjalan lebih cepat dan terarah. Lumajang diketahui merupakan wilayah strategis dalam produksi ternak sekaligus penyimpan plasma nutfah lokal, sehingga pemulihan sektor ini menjadi penting bagi keberlanjutan produksi di daerah tersebut.

Langkah cepat ini diharapkan tidak hanya memulihkan sektor peternakan, tetapi juga mengembalikan keberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kaki Gunung Semeru. **Humas Ditjen PKH**

Teknologi Canggih di Tengah Bencana Sumatera

Di tengah bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, kita melihat beberapa kendaraan operasional canggih untuk membantu korban bencana. Ada pesawat Airbus A400M Atlas yang membantu mengangkut bantuan ke lokasi bencana. Ada juga Hagglunds, kendaraan segala medan untuk menembus beratnya transfortasi di darat,

Pesawat Airbus A400M Atlas, Si Monster Udara



Untuk mempermudah pengiriman bantuan pangan ke lokasi bencana alam, pemerintah memberangkatkan dengan menggunakan pesawat Airbus A400M Atlas dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (4/12). Airbus tersebut, salah satu alutsista terbaru dan tercanggih yang dimiliki TNI Angkatan Udara.

Airbus A400M merupakan pesawat angkut militer generasi baru yang dikembangkan Airbus Defence and Space. Pesawat ini dirancang untuk memadukan kemampuan angkut strategis dan taktis dalam satu platform, sehingga menjadi andalan banyak angkatan udara di Eropa dan negara-negara mitra lainnya.

Berukuran besar dan bertenaga, A400M memiliki panjang 45,1 meter, rentang sayap 42,4 meter, dan tinggi 14,7 meter. Tenaganya disuplai oleh empat mesin turboprop Europrop International TP400-D6, mesin turboprop paling bertenaga di dunia yang memungkinkan pesawat ini melaju hingga 780 kilometer per jam atau Mach 0,72.

Pesawat ini juga memiliki daya jelajah luar biasa: mampu terbang hingga 3.300 kilometer dengan muatan penuh, dan mencapai 8.700 kilometer tanpa muatan.

Sebagai pesawat angkut, A400M dirancang untuk membawa beban berat dengan kapasitas hingga 37 ton. Ruang kargo lapang miliknya mampu memuat berbagai perlengkapan militer, mulai dari kendaraan lapis baja ringan, helikopter kecil, hingga dua truk militer.

Untuk pengiriman personel, A400M dapat menampung hingga 116 pasukan. Pesawat ini juga dapat dikonfigurasi menjadi unit medis udara yang mampu membawa hingga 66 tandu untuk keperluan evakuasi korban.

A400M memiliki kemampuan operasional yang luas. Pesawat ini dapat melakukan airdrop pasukan dan kargo dalam jumlah besar, serta memiliki fitur air-to-air refueling baik sebagai pesawat tanker maupun penerima bahan bakar.

Keunggulan lain adalah kemampuannya mendarat di landasan pendek, tidak beraspal, dan minim fasilitas. Hal ini membuat A400M sangat ideal untuk operasi di wilayah terpencil serta misi kemanusiaan dalam kondisi darurat—seperti pengiriman bantuan ke wilayah bencana di Sumatera saat ini.

Saat penyambutan A400M dari pabrik Airbus di Sevilla, Spanyol, Rabu (3/11), Presiden Prabowo Subianto menegaskan pesawat ini bukan hanya untuk kepentingan militer, tetapi juga misi kemanusiaan lintas negara. “A400M sangat mampu untuk misi kemanusiaan. Akan sangat berperan dalam evakuasi korban luka yang membutuhkan operasi dan layanan medis,” ujar Presiden Prabowo Subianto saat itu dengan nada bangga.

Karena itu, Presiden memerintahkan TNI AU melengkapi pesawat ini dengan modul operasi udara dan ambulans udara agar siap diberangkatkan kapan pun, termasuk untuk bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestina. Pesawat ini dijuluki *“The World’s Most Advanced Airlifter”* karena kemampuannya menggabungkan kecepatan, daya angkut besar, dan fleksibilitas misi.

Tak lama dari kedatangan, pesawat Airbus A400M langsung menunaikan tugasnya membanwa bantuan bencana di Pulau Sumatera.

Herman/Yul

HAGGLUNDS, Kendaraan Segala Medan



Bencana banjir dan tanah longsor yang menimpa Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mendorong kepedulian berbagai pihak. Salah satunya Aksi Relawan Mandiri Himpunan Alumni IPB (ARM HA-IPB) yang ikut turun ke lapangan membantu penyintas.

Lembaga otonom HA IPB yang sering bergarak dalam aksi nyata membantu korban bencana ini, menyerahkan bantuan tahap awal berupa paket obat-obatan. Di sela-sela acara penyerahan bantuan obat-obatan dari ARM HA IPB melalui PMI Provinsi Sumatera barat untuk para penyintas banjir, utusan ARM HA-IPB, Ali Fatoni serta Ketua DPD HA IPB Sumatera Barat, Uda Yozarwardi, diajak Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan Logistik PMI Sumbar, Hidayatul Irwan, melakukan inspeksi.

Pertama, tentu meninjau packing paket obat-obatan, yang rencananya digunakan untuk operasi layanan Kesehatan di 13 kabupaten/kota yang terdampak banjir. Kedua, ini yang menarik, tim ARM dan DPD HA IPB Sumbar juga mengecek kendaraan lapangan unggulan milik PMI. Namanya Hagglunds. Makhluk apa itu?

Hagglunds adalah kendaraan segala medan (all terrain vehicle) buatan Swedia yang dirancang untuk menjelajah kondisi ekstrem mulai daerah bersalju, sungai, permukaan bebatuan, melintsi air dalam, hingga bermanuver di kawasan lumpur dan puing pascabencana. Tim ARM dan HA IPB tentu terkagum-kagum dengan model dan penampakan kendaraan taktis ini.

”Saya kebetulan bekerja di Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah selama 12 tahun, dan ikut dalam berbagai misi kemanusiaan bersama PMI Pusat dan daerah. Seingat saya, PMI diperkuat kendaraan ini atas jasa Pak JK, kalau tak salah tahun 2010, tak lama setelah beliau menjabat sebagai Ketua Umum PMI,” kata Ketua Umum ARM HA-IPB, Ahmad Husein.

Memang Hagglunds menjadi andalan di berbagai medan bencana. Di erupsi Merapi, 2010, ketika kendaraan lain lumpuh, Hagglunds mampu menembus kawasan penuh lumpur panas untuk evakuasi dan transportasi barang bantuan.

Husein mengungkapkan, para relawan ARM HA-IPB sebagian mengenal Hagglunds saat pertama terjun di operasi tanggap darurat banjir Cileuksa, Kabupaten Bogor, tepatnya di Desa Pasir Madang, Kecamatan Sukajaya. Saat menurunkan barang dan membawanya ke Posko, beberapa relawan melihat sosok Hagglunds ini, putih, gagah, mentereng. Lalu mulai bertanya-tanya pada kru PMI yang mengoperasikannya.

“Saya sendiri punya memori Kocak dengan Hagglunds. Ketika Pameran AMMCDR 2012, PMI memamerkan Hagglunds di booth luasnya, dalam bentuk asli, penuh lumpur, spion pecah satu, rantai penuh lumpur,” tuturnya. Yang jelas, kendaraan inilah yang bisa digunakan untuk mengantarkan obat-obatan ke lokasi ekstrem terisolasi, jika diperlukan.

Yul

BENCANA SUMATERA dalam Sorotan Pakar Iklim dan Lingkungan



Banjir besar dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bahkan dampak musibah kali ini terbilang sangat besar dan berat. Bukan hanya kerusakan ekosistem, infrastruktur, tapi juga hilangnya ratusan nyawa manusia.

Mengapa dampaknya begitu besar? Ini yang menimbulkan pertanyaan besar kalangan ilmuan dan pakar ikim dan lingkungan dari IPB University.

Dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sonni Setiawan, SS, MSi, kondisi cuaca belakangan ini memang tergolong tidak biasa. Fenomena yang terjadi di Sumatera dipicu siklon tropis yang terbentuk sangat dekat dengan garis ekuator, sebuah kejadian yang jarang muncul.

“Tahun ini agak menarik perhatian para meteorologis karena siklon tropis terjadi di dekat ekuator, bahkan di bawah lintang 5 derajat,” ujarnya seperti dikutip dari laman IPB University. Fenomena ini dikenal sebagai Siklon Tropis Senyar, yang interaksinya diperkuat oleh beberapa sistem atmosfer lain.

Meski Indonesia bukan jalur utama siklon, namun menurut Sonni, dampaknya tetap signifikan. “Dampaknya memang tidak sebesar daerah di luar batas lintang tersebut, tetapi potensi hujan ekstrem dan angin kencang tetap perlu diwaspadai,” ungkapnya.

Fenomena siklon tropis dekat ekuator ini menjadi catatan penting bagi sains meteorologi Indonesia. Pemantauan satelit dan kajian lebih mendalam diperlukan agar masyarakat dapat lebih siap menghadapi cuaca ekstrem yang kian sering terjadi dalam konteks perubahan iklim global.

Kayu di Lokasi Bencana

Terkait dengan banyaknya material kayu yang mengalir saat banjir, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan sekaligus Kepala Pusat Studi Bencana IPB University, Prof Bambang Hero Saharjo menilai, karakteristik material kayu yang ditemukan di lokasi bencana di Sumatera menunjukkan indikasi keterlibatan aktivitas manusia.

“Kondisi tersebut tidak sepenuhnya dapat dijelaskan sebagai kayu lapuk atau dampak runtuhan alami,” kata Prof Bambang mengaitkan temuan tersebut dengan kasus serupa yang pernah ditangani beberapa tahun lalu di kawasan lindung Sumatera Utara.

Ia menggambarkan, hutan yang masih sehat memiliki struktur tajuk yang rapat dan bertingkat, sehingga mampu memecah dan menahan laju air hujan. Walaupun ada air, tapi tidak langsung ke permukaan. “Air akan jatuh di tajuk, pecah, kemudian sebagian mengalir melalui batang atau *stem flow,”* katanya.

Prof Bambang menambahkan, keberadaan tumbuhan bawah dan serasah berperan penting dalam menyerap air serta menjaga kestabilan ekosistem hutan. Lapisan vegetasi yang berjenjang, mulai dari tajuk atas hingga vegetasi bawah, menurutnya, merupakan sistem penyangga alami yang menjaga keseimbangan lingkungan.

“Tuhan menciptakan ini tentu saja untuk kebaikan manusia dan lingkungannya,” ujarnya seraya mengajak berpikir bahwa tumbangnya satu atau dua pohon dalam kondisi alami bukan merupakan ancaman bagi ekosistem. “Pohon ini, ya, kalaupun tumbang, itu tidak banyak. Paling hanya satu, dua. Dan itu alami,” tutur dia.

Justru kata Prof Bambang, sistem perakaran pohon tua yang kuat membuat hutan tetap stabil. Karena itu, ketika satu pohon tumbang, ruang kosong tersebut segera diisi regenerasi spesies baru.

Namun, menurutnya, masalah muncul ketika aktivitas pembalakan liar memasuki kawasan hutan. Gangguan pada vegetasi menghilangkan kerapatan tajuk dan membuka celah yang memicu perubahan drastis dalam aliran air serta kestabilan tanah. “Pada kondisi seperti ini, ketika pembalakan liar masuk, maka celah antara tajuk semakin terbuka,” ungkapnya.

Menurut Prof Bambang, hilangnya fungsi tajuk menyebabkan air hujan jatuh langsung ke permukaan tanah tanpa proses pemecahan alami, sehingga erosi berlangsung lebih cepat dan risiko longsor meningkat. “Kayu-kayu besar yang ditemukan pascabencana merupakan konsekuensi dari rusaknya lapisan-lapisan vegetasi akibat aktivitas manusia tersebut,” tuturnya.

Indikasi Penyebab Tunggal

Sementara itu, Ahli Kebijakan Hutan IPB University, Prof Dodik Ridho Nurochmat melihat, kayu-kayu besar dan kecil yang tampak berserakan di lokasi bencana tidak berasal dari satu penyebab tunggal. Berdasarkan informasi visual yang beredar di media sosial dan televisi, ia menilai kayu tersebut kemungkinan berasal dari campuran penebangan, pohon tumbang, serta sisa *land clearing* yang tidak dibersihkan.

“Bisa dari penebangan lama atau pembersihan lahan yang tidak tuntas. Jika terbawa arus air, kayu itu akan mengambang. Namun bisa juga dari penebangan kayu yang baru. Untuk itu harus ada investigasi,” ujarnya.

Namun Dodik mengaku belum dapat memastikan apakah kayu tersebut seluruhnya merupakan kayu gelondongan baru atau kayu lama yang terseret arus. Debit air besar saat longsor, menurutnya, memungkinkan pohon tumbang ikut hanyut, sehingga menambah campuran material kayu di lokasi.

Mengenai perbedaan kayu hasil pembalakan dengan kayu tumbang alami, Prof. Dodik mengatakan, kayu hasil tebangan pasti memiliki bekas gergaji yang jelas. Sedangkan kayu yang tumbang alami tidak menunjukkan pola potongan yang rapi. “Dari gambar terlihat potongan kayu berukuran kecil dan besar. Tapi tidak bisa dilihat secara detail apakah potongannya rapi atau akibat tumbang alami,” katanya.

Namun Ia menekankan perlunya pembenahan tata kelola lingkungan agar kejadian serupa dapat dicegah. Begitu juga terkait penyebab longsor, Prof Dodik menilai, kejadian tersebut merupakan kombinasi faktor alam dan faktor manusia. “Ada cuaca ekstrem, kondisi geografis pegunungan, dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia,” ujarnya.

Karena itu, Prof. Dodik menegaskan, pentingnya kepatuhan terhadap regulasi seperti AMDAL, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penegakan hukum yang tidak hanya fokus pada denda, tetapi juga pemulihan lingkungan.

Ia pun mengingatkan agar penurunan tutupan hutan diperhatikan serius karena berdampak pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. “Masyarakat harus bisa mengambil manfaat dari hutan tanpa merusaknya,” ujarnya seperti dikutip dari laman IPB University. **Yul**

KAWAL BANTUAN
Bencana Alam Sumatera

Berbagai bantuan mengalir untuk korban bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Bahkan Kementerian Pertanian berhasil mengumpulkan donasi sebanyak Rp 75 miliar. Dengan besarnya donasi tersebut, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman meminta untuk dikawal jangan sampai ada yang melakukan penyimpangan.

Setelah melepas bantuan bencana alam di Pulau Sumatera menggunakan pesawat Airbus A400M di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (4/12), Pemerintah kembali melepas bantuan menggunakan KRI Banda Aceh 953 melalui Dermaga Markas Komando Lintas Laut Militer, Tanjung Priok, Jumat (5/12).

Pada tahap awal total bantuan yang diberangkatkan mencapai 207 truk senilai Rp34,8 miliar, bagian dari total bantuan sebesar Rp75 miliar yang telah dihimpun. Penyaluran tambahan terus dilakukan mengikuti perkembangan situasi di lapangan.

Saat melepas keberangkatan bantuan pangan "Kementan Peduli Bencana" , Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, seluruh bantuan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak masyarakat



di lapangan. Bantuan mencakup pangan siap konsumsi seperti mi instan, sosis, susu, beras, air mineral, minyak goreng, hingga genset yang dibutuhkan akibat keterbatasan energi dan terisolasinya sejumlah wilayah.

Amran memastikan, seluruh bantuan dalam program Kementan Peduli untuk korban bencana di Sumatera akan mendapat pengawalan ketat agar tersalurkan tepat sasaran tanpa penyimpangan. Bantuan dikirim melalui darat, udara, dan laut secara berkelanjutan, termasuk menggunakan pesawat dan kapal laut dengan dukungan penuh TNI.

"Ini adalah bentuk tanggung jawab kita. Karena itu setiap proses pengiriman kami kawal secara ketat," kata Amran saat meninjau langsung proses loading logistik ke atas kapal KRI Banda Aceh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (5/12).

Selain bantuan dari program Kementan Peduli, Amran juga menyampaikan pemerintah telah mengirimkan bantuan pangan reguler berupa 44 ribu ton beras serta 6 ribu ton minyak goreng sebagai dukungan pemenuhan stok pangan daerah terdampak. Cadangan beras pemerintah juga disiapkan hingga tiga kali lipat dari kebutuhan agar tidak terjadi kekurangan suplai di lapangan.

Pada kesempatan ini, Amran mengapresiasi dukungan operasi penyaluran ini tidak hanya melibatkan TNI AL dan TNI AU, tetapi juga jajaran lainnya termasuk TNI AD, Polri, BNPB, Bulog, dan pemerintah daerah setempat. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen yang terlibat dalam percepatan penanganan.

Pengawalan distribusi juga dilakukan secara berlapis. Tim gabungan dari pejabat eselon 1, UPT daerah, serta mitra strategis dikerahkan ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dengan pengawalan berlapis, percepatan distribusi, dan dukungan lintas lembaga, Kementan memastikan seluruh bantuan bagi warga terdampak bencana di Sumatra tersalurkan dengan cepat, tepat, dan bertanggung jawab

Kementan mengajak masyarakat aktif mengawasi dan mengawal ketat penyaluran bantuan beras bagi korban bencana alam di Sumatera, agar distribusi berjalan transparan dan benar-benar tepat sasaran. Keterlibatan publik sangat penting untuk mencegah potensi penyimpangan di lapangan.

"Dalam situasi seperti ini, concern utama kami adalah memastikan semua bentuk bantuan bisa disalurkan dengan cepat dan tepat. Kami berterimakasih publik terus mengawasi proses penyaluran. Kami meminta publik untuk tidak segan untuk melaporkan bila ditemukan penyimpangan," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch. Arief Cahyono. **Yul**

Pasok Wilayah Bencana Sumatera, Bulog Pastikan Stok Beras Aman



Perum BULOG bergerak cepat merespons bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Untuk memastikan seluruh bantuan tersalurkan dengan baik serta menjamin ketersediaan stok beras bagi masyarakat terdampak, Direksi BULOG turun langsung ke lapangan sejak hari pertama masa tanggap darurat.

Direktur Utama BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, memimpin langsung koordinasi penanganan bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, sekaligus memastikan bahwa seluruh jajaran BULOG bekerja optimal dalam mendukung pemerintah daerah setempat.

Selain mengecek kondisi stok, Rizal secara langsung ikut membantu proses distribusi bantuan serta menyapa masyarakat terdampak untuk memberikan penguatan moral di tengah situasi sulit. "Kami memastikan stok beras untuk kebutuhan tanggap darurat bencana di wilayah Sumatera berada dalam kondisi aman dan siap dimobilisasi kapan pun dibutuhkan," katanya.

BULOG telah menyalurkan bantuan melalui berbagai skema, yaitu melalui Cadangan Beras Pemerintah untuk Bencana Alam (CBP Bencal), Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), serta program Bantuan Pangan (Banpang) alokasi Oktober–November 2025.

Hingga 1 Desember 2025, untuk Aceh BULOG telah menyalurkan CBP Bencal sebanyak lebih dari 216,9 ton beras, menyalurkan CPPD sebanyak 281 ribu ton beras dan Banpang alokasi Oktober November sebanyak 2.440 ton beras dan 488 kilo liter minyak goreng.

Untuk Provinsi Sumatera Utara, BULOG telah menyalurkan CBP Bencal sebanyak 45 ton beras, menyalurkan CPPD sebanyak 43,2 ton beras dan Banpang sebanyak 6.449 ton beras dan 1.289 kilo liter minyak goreng. Khusus di Sumatera Utara, akan dilakukan penebalan stok beras dengan tujuan Sibolga sebanyak 1.562 ton dan Nias sebanyak 1.650 ton.

Sedangkan untuk Provinsi Sumatera Barat, BULOG telah menyalurkan CPPD sebanyak 85,6 ton beras dan bantuan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tahap awal sebanyak 1.300 kg beras, 179 liter minyak goreng, gula pasir, mie instan, makanan kemasan serta ratusan kotak nasi box. Sedangkan realisasi penyaluran Banpang sebanyak 4.643 ton beras dan 928 kilo liter minyak goreng.

BULOG Kanwil DKI Jakarta dan Banten direncanakan akan memberangkatkan pasokan beras ke wilayah Sumatera bagian utara, yaitu 1.400 ton menuju Sibolga. Sebanyak 400 ton telah berada di sekitar Pelabuhan Sibolga dan 1.650 ton untuk wilayah Nias, dengan 400 ton yang telah tiba di Pelabuhan Teluk Bayur Padang. **Yul**


TABLOID Sinartani
HAKORDIA
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA 2025
HARI ANTI
KORUPSI SEDUNIA
9 Desember 2025
Lewat peringatan Hakordia 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat untuk merayakan kejujuran
STOP CORRUPTION
TAHANAN KPK
satukan aksi dan buktikan bahwa bangsa ini kuat karena rakyatnya berani melawan korupsi